Pojok Rektor #5

KESADARAN KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI

Fathul Wahid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pojok Rektor #5

Kesadaran Kolektif Perguruan Tinggi

Fathul Wahid

Universitas Islam Indonesia
2023

Kesadaran Kolektif Perguruan Tinggi
Fathul Wahid

Hak cipta (c) 2023, ada pada penulis. Diizinkan menyalin dan atau mendistribusikan ulang konten buku untuk keperluan nonkomersial dengan menyebutkan sumber.

Cetakan 1
Februari 2023

ISBN: 978-602-450-804-3
E-ISBN: 978-602-450-805-0

Diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta, 55584
Telepon: (0274) 898444 ekstensi 2301
Email: penerbit@uii.ac.id

Anggota IKAPI Yogyakarta

Kata Pengantar

Hanya ungkapan syukur yang bisa saya panjatkan kepada Allah ketika buku ini dapat diterbitkan. Ini buku bunga rampai kelima dari tulisan-tulisan pendek yang sudah tayang di "Pojok Rektor", rubrik khusus di situs web *uii.ac.id*. Tulisan pertama di rubrik itu tayang pada 1 Juni 2018, hari pertama ketika saya dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) periode pertama, 2018-2022.

Tulisan dalam buku ini berasal dari beragam sumber, termasuk sambutan, khotbah, atau artikel yang tayang di media massa. Hanya penyuntingan kecil yang saya lakukan untuk menjadikannya layak dinikmati dalam bentuk bacaan. Sebagai sebuah bunga rampai, perulangan kadang tidak bisa sepenuhnya terhindari, meskipun sudah saya buat sangat minimal. Jikapun masih ditemukan di beberapa tempat, mohon maklum.

Karena tulisan saya hasilkan dalam konteks beragam, sebuah bingkai saya hadirkan untuk memudahkan pembacaan. Bingkai besar tersebut berkait dengan kesadaran kolektif perguruan tinggi dalam melihat dan menyikapi beragam isu.

Paling tidak ada dua kesadaran yang saya soal dalam buku ini. Kedua kesadaran itulah yang menjadi subbingkai untuk mengelompokkan tulisan dalam buku ini.

Pertama, kesadaran sebagai anak bangsa. Tulisan yang berkait dengan isu-isu publik dan kebangsaan, saya masukkan dalam kelompok ini. Kelompok ini saya dahulukan untuk menegaskan: kepentingan bangsa harus mendapat prioritas terbaik.

Kedua, kesadaran sebagai warga kampus. Tulisan yang mengangkat isu keilmuan, manajemen perguruan tinggi, dan intelektualisme, saya bingkai sebagai bagian kesadaran peran sebagai warga kampus. Termasuk dalam kelompok ini adalah tulisan yang mengangkat isu keislaman dan keagamaan secara luas.

Saya berharap, berbagai ide yang terekam dalam tulisan-tulisan ini akan mengusik pemahaman jamak yang selama ini kita yakini, memantik kerutan dahi untuk memikirkan ulang beragam hal, dan juga mengajak mendiskusikan lebih lanjut dengan asyik.

Hanya dengan demikian, aksi kolektif menjadi mungkin terwujud. Setiap aksi tersebut pasti didahului kesadaran kolektif, sesuatu yang menantang untuk kita bentuk karena melibatkan pertukaran ide yang cukup intensif untuk mencapai konsensus sampai level tertentu.

Kesadaran baru ini saya harapkan akan menjadi penyeimbang narasi atau perspektif arus utama yang beredar. Arus utama tersebut termasuk, sebagai contoh, adopsi neoliberalisme dalam manajemen perguruan tinggi, pengabaian posisi kepengikutan (*followership*) konteks

kepemimpinan organisasi, sampai dengan peran intelektual publik yang sudah luntur.

Saya tentu berharap, perlawanan kecil yang bermula dari kesadaran etis ini bermakna. Semoga tidak menjadi seperti Don Quixote, tokoh dalam novel Miguel de Cervantes, ketika melawan kincir angin yang dia kira sebagai raksasa.

Terakhir tetapi bukan afkir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Om Timur Suprabana dan Pak Putu Gunawan Budi Susanto yang sudah berkenan membaca dan menyunting buku ini, sehingga menjadi semakin enak dibaca.

Semoga bermanfaat!

Yogyakarta, 11 Maret 2023

Fathul Wahid
Rektor Universitas Islam Indonesia

المعهد الإسلامي السلفي روضة المتعلمين

PONDOK PESANTREN

Roudlotul Muta'allimin

JAGALAN – KUDUS – INDONESIA

Daftar Isi

Bagian 1 Kesadaran Anak Bangsa

1. Indonesia 2045: Daftar Pertanyaan

Dialog kebangsaan kali ini merupakan ungkapan syukur kita semua sebagai bangsa Indonesia yang tidak pernah kalis dari nikmat Allah. Kita semua *insya Allah* sepakat, banyak kemajuan yang sudah bangsa Indonesia dokumentasikan sejak kemerdekaan.

Hanya, sering kali kultur saling mengapresiasi yang belum terbentuk menjadikan banyak kebaikan dan capaian itu tertutup oleh sikap kufur nikmat dan bahkan arogansi kelompok.

Ikhtiar ini juga merupakan bentuk optimisme sebagai anak bangsa yang percaya bahwa bangsa Indonesia akan terus ada. Kalaupun Indonesia harus bubar, meminjam istilah Allahuyarham Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, hanya satu hari sebelum kiamat.

Dialog kebangsaan dalam rangkaian peringatan Milad Ke-79 Universitas Islam Indonesia (UII) ini terselenggara atas kerja bareng antara UII dan *Republika*. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada *Republika* yang telah berkenan bersama-sama melantangkan pesan optimisme.

Dialog kebangsaan juga bisa kita lihat sebagai wujud kerinduan anak bangsa yang memimpikan Indonesia yang

lebih baik. Sebentar lagi, kita sebagai bangsa, akan mensyukuri nikmat kemerdekaan pada tahun ke-77. Waktu ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan refleksi kolektif atas perjalanan bangsa dan negara sejak merdeka.

Beragam pertanyaan bisa kita ajukan. Apakah, misalnya, bangsa Indonesia sudah mencapai tujuan sebagaimana cita-cita para penggagas dan pendiri, *the founding parents*, *al-sabiqun al-awwalu*n?

Beragam jawaban bisa kita kumpulkan.

Rasa syukur, optimisme, dan kerinduan itu tidak lantas menjadikan lupa bahwa masih banyak pekerjaan rumah perlu diselesaikan secara kolektif. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi seluruh anak bangsa.

Pertanyaan Reflektif

Saya berharap, dialog kebangsaan ini bisa melantangkan pesan-pesan reflektif kepada khalayak luas. Kita bisa menggunakan beragam bingkai dalam melakukan refleksi. Salah satunya adalah Pancasila, anugerah luar biasa yang telah menjadi pengikat bangsa Indonesia.

Bagi saya, sila-sila dalam Pancasila dapat menjadi obor penunjuk jalan bersama. Dua sila pertama bisa kita anggap sebagai titik pijak, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah nilai pijakan abadi yang valid untuk setiap konteks.

Dua sila berikutnya, persatuan dan permusyawaratan atau demokrasi, menjadi prasyarat. Sejarah umat manusia

mencatat, tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang berhasil maju tanpa persatuan dan gerak bersama.

Satu sila terakhir, sebagai tujuan utama berbangsa dan bernegara, keadilan sosial. Ini ada pekerjaan rumah berat, tetapi bukan berarti tak mungkin diwujudkan.

Kita selanjutnya bisa merumuskan beragam pertanyaan untuk dijawab. Berkait dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kita bisa tanyakan: apakah semua anak bangsa sudah dapat menjalankan ajaran agama secara aman dan nyaman, termasuk minoritas? Apakah umat beragama sudah saling menghargai secara tulus sepenuh hati, dan tidak berbeda antara di forum publik dan di ruang privat?

Apakah penghargaan kepada *liyan*, yang lain, dan nilai-nilai kemanusiaan sudah secara konsisten diterapkan oleh anak bangsa? Apakah kesetaraan di depan hukum sudah menemukan bukti?

Berkait dengan persatuan dan demokrasi, pertanyaan lain bisa kita lanjutkan. Apakah semua anak bangsa sudah sadar dan mengupayakan secara serius untuk menjaga persatuan Indonesia? Ataukah malah sebaliknya, kepentingan sesaat dan kadang sesat, menjadikan keterbelahan yang makin menganga?

Apakah suara anak bangsa secara tulus dan istikamah diberi ruang dan didengarkan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah koreksi dari publik dirayakan sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara? Atau para wakil rakyat telah betul-betul menempatkan

kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan?

Kita pun bisa lanjutkan dengan beberapa contoh pertanyaan lain, berkait dengan tujuan utama berbangsa. Apakah keadilan sosial yang kita mimpikan bersama sudah terwujud di Bumi Pertiwi? Apakah ketimpangan yang ada sudah secara serius diupayakan untuk dikurangi? Apakah alam yang menjadi penopang kehidupan manusia dalam jangka panjang sudah mendapatkan perhatian sepatutnya?

Kesadaran Kolektif

Tulisan ringkas ini lebih banyak berisi daftar pertanyaan. Dan, daftar pertanyaan tersebut, tentu, bisa kita perpanjang. Keteguhan kita dalam memegang nilai dan sensitivitas kita alam membaca keadaan akan menjadi basis membuat pertanyaan tambahan.

Selain saya menitipkan ini menjadi pekerjaan rumah bersama, pada kesempatan dialog kebangsaan yang baik ini, saya berharap, jawaban dari beberapa pertanyaan bisa kita dengar. Saya yakin jawaban-jawaban itu akan memantik kesadaran kolektif kita sebagai anak bangsa.

Saya berharap, melalui tema yang diusung "Imaji Satu Abad Indonesia", dialog kebangsaan ini akan mengingatkan kita untuk tak lelah mencintai Indonesia, mengumpulkan imaji kolektif masa depan Indonesia, melantangkan pesan optimisme, dan sekaligus menggerakkan kita semua untuk berkontribusi bagi Indonesia yang menghormati nilai-nilai ketuhanan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, mengupayakan persatuan,

merayakan demokrasi yang bermartabat, menuju keadilan sosial bagi semua.

Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mahfud M.D. yang berkenan memberikan pidato kunci dan pengantar dialog, Gus Yahya Cholil Staquf dan Prof. Musa Asy'arie yang berkenan berbagi perspektif dan inspirasi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Irfan Junaidi yang berkenan memimpin dialog, *Republika* untuk kerja sama yang baik selama ini, dan semua panitia yang menyiapkan acara ini dalam waktu sangat singkat, serta hadirin sekalian.

Semoga dialog kebangsaan ini membawa keberkahan.

Sambutan pada pembukaan
Dialog Kebangsaan "Imaji Satu Abad Indonesia", yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia, 26 Juli 2022.

2. Pancasila, Simpul Bangsa

Indonesia dibangun di atas keragaman yang ditenun oleh para pendiri bangsa, yang mengedepankan persamaan dan mengesampingkan perbedaan. Semua dilakukan dengan kesadaran tinggi, dan bisa jadi dilakukan dengan menurunkan "harga diri" sebagai ikhtiar untuk membuat ruang kolektif yang saling menguatkan.

Prosesnya tentu panjang dan tidak selalu mudah. Bahkan, sampai hari ini, sebagian anak bangsa masih terus menggugat proses kebangsaan yang agung itu.

Pancasila merupakan salah satu kristalisasinya. Ia lahir dari dialog serius para negarawan yang sudah paripurna dengan diri masing-masing. Karena itu, mereka tidak pernah mengklaim bahwa Pancasila lahir dari dirinya saja. Ada proses sintesis saling mengisi di sana.

Pancasila adalah simpul bangsa, ikatan yang kuat, *mitsaq ghalidh*. Karena itu, setiap upaya yang melemahkan simpul ini perlu disikapi secara serius.

Mencari Sebab

Namun mengapa selalu saja ada pihak yang ingin melemahkan? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang

lugas, supaya akar permasalahan terurai dan formulasi solusinya tepat sasaran.

Pertama, apakah karena pemahaman kebangsaan yang mengabaikan sejarah lampau? Betul, sejarah memang kita yang menulis, tetapi di sana ada nilai yang ditanamkan. Selama yang ditanam nilai-nilai abadi, seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, sejarah tetap perlu diyakini. Ia adalah pijakan untuk mengisi masa kini dan masa depan.

Sayang, memori kolektif kita berusia pendek. Apalagi pada era kelimpahan informasi yang tidak mudah disaring. Beragam versi sejarah pun bisa muncul dengan mudah.

Sejarah mana yang bisa kita percaya? Sejarah yang manusiawi. Sejarah yang mencatat aktor-aktornya secara wajar dan memercayai setiap pencapaian merupakan ikhtiar kolektif. Bisa jadi ada tokoh kunci, tetapi itu tidak lantas menjadi alasan menafikan pihak lain. Sejarah harus bersifat kolektif. Tanpa itu, kesaktian yang dimiliki untuk menyatukan bangsa ini akan sirna.

Kedua, apakah juga karena pemahaman keagamaan yang sempit? Sangat mungkin terjadi. Karena itu, eksposur terhadap keragaman tafsir dan pemikiran menjadi penting. Alquran dan Hadis, dalam konteks Islam, terbuka untuk selalu dibaca. Setiap pembacaan sangat mungkin memberikan pemahaman baru.

Pesan-pesan seperti itu perlu dilantangkan. Tidak harus secara vulgar atau ada semacam pesan sponsor. Pemahaman Islam wasatiah, proporsional, dan condong kepada keadilan, merupakan yang paling jamak di Indonesia. Hanya, bisa jadi, pesannya kurang dilantangkan.

Islam kadang ditempeli label untuk menggalang dukungan, menguatkan ikatan, dan memobilisasi gerakan. Labelnya pun beragam. Sebagian bahkan tanpa label. Karena di luaran sana, label kadang membuat orang alergi, sehingga menjadi sekat untuk berkomunikasi, meski yang diharapkan tidak demikian.

Hal itu menantang. Bagaimana nilai-nilai proporsionalitas dalam beragama tetap lantang, bahkan tanpa label apa pun. Karena itulah yang kita yakini sebagai tafsir yang berdasar kuat dan masuk akal.

Ketiga, ataukah pemahaman keberagamaan sempit ini menyebar di kelompok dengan karakteristik tertentu yang dominan? Kelompok dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, komunitas, akses informasi, pengalaman lampau, kepentingan politik, atau karakteristik tertentu yang lain? Informasi seperti ini penting untuk merumuskan program intervensi.

Sangat mungkin gerakan pelemah simpul bangsa ini tidak berdiri sendiri. Kelompok pendukungnya punya alasan tertentu. Apakah itu berkait dengan kesejahteraan yang timpang, amanah yang terkhianati, keadilan yang tergadai, atau yang lain? Itu merupakan pekerjaan rumah yang perlu mendapat jawaban serius.

Peran Pendidikan

Bagaimana dengan peran pendidikan atau edukasi publik? Hal itu penting dibahas, termasuk strateginya. Penanaman nilai-nilai merupakan hal yang menantang. Apalagi pada era seperti sekarang.

Pertama, saya melihat penanaman nilai, termasuk nilai-nilai Pancasila, tidak bisa seperti mengisi air ke botol dengan corong, semacam pencekokan. Anak didik akan kedodoran dalam mengikuti dan termasuk ada kemungkinan tidak bisa menerima.

Menanamkan nilai ibarat menyuntikkan obat melalui selang infus. Pelan, butuh waktu untuk meresap, dan penerima tidak menolak. Kesadaranlah yang disasar.

Argumentasi dengan beragam ilustrasi yang membuat orang terlibat dalam diskusi sangat penting. Rasionalitas manusia perlu dimuliakan. Dampaknya bisa sangat dahsyat: internalisasi nilai yang kuat.

Penanaman nilai tidak bisa secara vulgar. Apalagi jika yang diinginkan adalah internalisasi. Kevulgaran hanya akan memberikan hasil instan yang bersifat superfisial. Kenyataannya tidak seindah tampilan pada unggahan media sosial yang penuh kepalsuan.

Belum lagi, ada kemungkinan penolakan. Apalagi dengan tambahan label: *minna wa minhum*, kelompok kita dan kelompok mereka, yang dideklarasikan publik, termasuk di media sosial. Penyematan label seperti itu berpotensi membelah dan tidak produktif untuk merangkul dan menyatukan.

Kedua, dalam penanaman nilai jangan sampai mempertentangkan Pancasila dengan agama. Ini bukan semata soal sensitif, melainkan pemahaman yang mempertentangkan keduanya juga merupakan bukti literasi sejarah kebangsaan yang rendah.

Seharusnya tidak sulit bagi seorang muslim untuk memahami bahwa nilai-nilai Pancasila sepenuhnya kompatibel dengan ajaran agama. Saya juga termasuk yakin, kesadaran keberagamaan yang mendalam dari para penggagas sangat memengaruhi kelahiran Pancasila.

Ketika pendekatan pertentangan dipertontonkan, jangan heran jika mereka yang mencintai agamanya menjaga jarak dari Pancasila.

Bukankah tidak semua begitu? Lagi-lagi, ini cara *ngeles,* mengelak, yang membahayakan dalam menjaga keutuhan bangsa. Tentu ini bukan yang kita inginkan.

Terakhir, negara ibarat orang tua, pengayom semua anak bangsa, bahkan termasuk yang nakal sekalipun. Anak nakal tidak lantas diusir dari rumah yang akhirnya dirawat orang lain yang nilainya mungkin tidak kongruen atau kompatibel dengan kita.

Anak nakal perlu disadarkan. Kadang cukup dinasihati, kadang dicubit, kadang dijewer, atau bahkan ditraktir dulu supaya hatinya melunak, sebelum kita memasukkan nilai baru. Semua tindakan harus didasari hukum yang berlaku dan selalu memuliakan manusia.

Wallahualam bissawab.

Elaborasi ringan dari poin-poin yang saya sampaikan pada diskusi kelompok terpumpun di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 5 Juni 2022.

3. Dunia Pascapandemi: Terhubung, Digital, dan Timpang

Saya berharap, bekal yang Saudara kumpulkan ketika kuliah sudah cukup untuk menapaki dunia berkarya, baik dengan membuka usaha sendiri, bekerja di lembaga yang sudah ada, maupun melanjutkan studi. Meski demikian, lingkungan terus berubah dan membutuhkan kecakapan yang lebih tinggi dan bahkan kecakapan baru. Karena itu, perlu terus menghidupkan semangat untuk terus belajar.

Belajar dapat berlangsung dalam konteks sangat luas, termasuk melakukan refleksi atas fenomena di sekitar kita. Misalnya, pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya sirna, meski telah memberikan dampak buruk luar biasa dalam kehidupan manusia modern, tetapi pada saat yang sama telah mengajari kita banyak hal.

Dunia yang Terhubung

Kita makin sadar bahwa dunia saling terhubung dengan erat. Kejadian di satu pojok dunia dapat dengan cepat memengaruhi pojok dunia yang lain. Pandemi yang

merebak di sebuah negara, memicu negara lain untuk mengambil kebijakan pembatasan pintu masuk, misalnya.

Pelajaran ini valid untuk banyak konteks. Siapa sangka, misalnya, perang Rusia dan Ukraina telah memengaruhi negara-negara lain yang mengimpor komoditas dari kedua negara tersebut. Termasuk di antaranya produk energi, pupuk, dan biji-bijian.

Terganggunya jalur transportasi di Laut Hitam karena perang, misalnya, telah memengaruhi pasokan gandum ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti Qatar, Mesir, dan Lebanon. Indonesia pun terdampak meskipun tidak seberapa, karena impor gandum dari Ukraina tidak dominan. Harga komoditas terdampak pun naik, bahkan sampai di atas 50%.

Ilustrasi tersebut menegaskan, globalisasi nyata adanya. Batas antarnegara makin terlihat memudar dan kesalingtergantungan pun sangat tinggi.

Saudara, kita sekarang hidup pada era seperti ini. Karena itu, pola pikir kita pun harus berubah, untuk selalu awas dengan perubahan lingkungan global. Meski demikian, kita harus tetap menggunakan kacamata kritis, supaya tidak latah mengikuti tren tanpa pemahaman yang baik. Pada saat yang sama, itu juga berarti kita harus menyiapkan diri menjadi warga global yang bisa bermain aktif.

Dunia Digital

Pandemi Covid-19 juga makin menyadarkan kita bahwa semua yang dapat digitalkan akan didigitalkan.

Pandemi telah mempercepat proses digitalisasi di banyak sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Tentu, banyak catatan yang bisa diberikan berkait risiko yang harus dimitigasi, misalnya.

Banyak praktik baik yang masih mungkin diteruskan dan bahkan ditingkatkan. Termasuk perbaikan layanan digital yang dapat diakses di mana saja, dan pengembangan konten pembelajaran digital untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Hal itu valid untuk konten yang dikembangkan sebagai pelengkap pembelajaran luar jaringan (luring) maupun yang ditujukan secara khusus untuk pembelajaran dalam jaringan (daring).

Sebagai ilustrasi lain, dalam beberapa tahun terakhir, kita menjadi saksi bahwa layanan digital di sektor bisnis berkembang sangat cepat. Saat ini, kita bisa mendapatkan beragam layanan hanya melalui ponsel, termasuk pemesanan tiket perjalanan, pemesanan hotel, pembelian beragam produk, dan bahkan layanan mobilitas.

Banyak layanan menjadi makin mudah. Kita pun makin terbiasa dengan perubahan-perubahan tersebut. Hidup menjadi sangat digital, suka atau tidak suka.

Karena itu, Saudara perlu terus mengasah kecakapan digital. Dunia masa depan yang serbadigital dipastikan akan berbeda dari dunia masa lalu dan masa kini.

Ketimpangan Sosial

Kita pun makin sadar, ketika mobilitas fisik dibatasi oleh pandemi, manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari cara untuk berhubungan dengan manusia lain.

Keterkungkungan karena pembatasan mobilitas telah membuat kita merasa ada yang hilang dari sisi kemanusiaan kita, yaitu kehadiran orang lain.

Karena itu, ketika menyadari, World Health Organization (WHO) segera mengubah sebutan menjaga jarak sosial (*social distancing*) menjadi menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Yang dibatasi adalah jarak fisik untuk mencegah penularan. Jarak sosial justru harus didekatkan.

Kesadaran itu perlu terus dilantangkan, kita adalah makhluk sosial yang saling tergantung satu dengan yang lain. Kesalingtergantungan itu mempunyai banyak implikasi, termasuk untuk terus saling peduli dan menjaga.

Mengapa hal itu penting? Karena, pandemi juga menyadarkan bahwa dunia "tidak rata", ada ketimpangan tajam antarkelompok masyarakat. Kita menjadi saksi, sebagian kelompok masyarakat sangat rentan terdampak pandemi, bahkan ketika baru menyerang. Itulah mengapa jarak sosial perlu didekatkan, karena yang berpunya dapat membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan.

Dampak pandemi terhadap perekonomian belum sepenuhnya sirna. Pemulihan ekonomi tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Karena itu, kita pun perlu mengelola ekspektasi.

Saya secara personal sadar, kampus-kampus yang berpostur mahasiswa dari kelas menengah ke bawah langsung terdampak pada tahun pertama pandemi. Dan, itu terbukti.

Pada tahun kedua, tabungan publik menipis, kampus-kampus menengah pun terdampak. Prioritas pengeluaran publik sangat mungkin beralih.

Saat ini, ketika memasuki tahun ketiga dan kehidupan menjadi makin normal, ternyata keadaan tidak lantas membaik. Saya salah membuat prediksi; dampak yang dirasakan banyak kampus makin nyata. Salah satunya adalah ketercapaian cacah mahasiswa baru jauh di bawah target. Bisa jadi karena perekonomian belum sepenuhnya pulih dan tabungan publik belum terisi kembali.

Alhamdulillah, UII meski terdampak, masih dapat bertahan dan terus berkembang. Semua itu tidak mungkin tanpa dukungan dari banyak pihak, termasuk mahasiswa dan keluarga mereka. Selama pandemi, UII telah dimampukan oleh Allah memberi potongan SPP lebih dari Rp. 125 miliar.

Kami tentu sangat bersyukur dapat melakukan itu semua, apalagi tanpa pengurangan gaji dan pemberhentian pegawai. Hasil survei yang Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V lakukan, menunjukkan hanya 27% perguruan tinggi swasta yang tidak mempunyai masalah keuangan.

Dalam konteks ini, saya ajak Saudara terus mengasah kecakapan sosial, mempertajam kepedulian sosial, dan mencari cara untuk selalu dapat berkontribusi di tengah-tengah masyarakat yang masih timpang dalam banyak hal.

Sambutan pada acara wisuda Universitas Islam Indonesia,
24-25 September 2022.

4. Ketidakpastian dan Akal Sehat Bangsa

Saya yakin, peran yang Saudara pilih ketika berkarya, meluruskan niat untuk memberikan kontribusi terbaik dan memberikan manfaat kepada *liyan*. Saya juga yakin, dalam menjalankan peran tersebut, Saudara sudah sadar bahwa lingkungan terus berubah.

Perubahan membutuhkan kecakapan yang lebih tinggi dan bahkan kecakapan baru. Karena itu, Saudara harus terus menghidupkan semangat untuk terus belajar. Asah selalu kurva pembelajaran Saudara. Tidak ada garis finis dalam belajar untuk para pembelajar sejati.

Ketidakpastian Masa Depan

Saudara akan menapaki anak tangga masa depan yang sudah direncanakan. Memang sangat mungkin, tidak semua berjalan sesuai dengan rencana, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak membuat rencana secara hati-hati. Itulah salah satu karakter masa depan yang penuh ketidakpastian.

Ketidakpastian mengharuskan kita untuk selalu awas dengan perubahan. Kita pun dituntut sigap dalam

merespons. Kecakapan merespons dan beradaptasi dengan ketidakpastian itulah salah satu yang dibutuhkan pada masa depan.

Saudara harus menyiapkan diri untuk menerima kejutan-kejutan dalam perjalanan menapaki anak tangga. Kejutan itu dapat membelokkan arah masa depan Saudara. Namun jangan khawatir, tugas kita memang merencanakan dengan baik dan menapaki sepenuh hati. Kita tidak akan tahu akan berakhir di mana, dan dengan kelok seperti apa perjalanan yang akan kita lewati.

Saya mengajak Saudara menyadari hal itu. Hanya dengan perspektif seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Kita pun tidak lantas berkembang menjadi manusia yang lebih suka menyalahkan *liyan* ketika ada masalah menerpa.

Meski tantangan personal sudah cukup menyibukkan, itu tidak boleh menjadikan kita abai terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar. Setiap aktivitas sudah seharusnya secara kolektif bisa kita akumulasikan untuk kemajuan bangsa ini.

Akal Sehat Bangsa

Saudara, sebentar lagi sebagai bangsa kita akan memasuki tahun politik pada 2024, ketika pemilihan presiden digelar. Suhu politik, saat ini, sudah terasa menghangat. Ketidakpastian juga bagian inheren dari proses itu.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menitipkan beberapa pesan, tidak hanya untuk para wisudawan, tetapi untuk kita semua.

Pertama, tetaplah rawat akal sehat. Ini bukan hal mudah, ketika banyak di antara kita tidak menjadi pemikir yang merdeka dan mandiri, serta cenderung mengikuti narasi publik yang sering kali dipenuhi beragam kepentingan.

Akal sehatlah yang bisa menepis beragam informasi salah atau hoaks yang berkembang dengan pesat di tengah-tengah kita. Akal sehatlah yang akan menjadikan kita tidak mudah diadu domba dan menerima hasutan.

Jika semua alumnus mampu melakukan, akan terbentuk akal sehat kolektif, yang penting untuk merawat persatuan bangsa ini. Inilah warisan mahal dari para pendiri bangsa yang harus kita pertahankan. Kita sudah menjadi saksi sejarah, banyak bangsa yang hancur ketika tidak bisa menjaga persatuan.

Kedua, jadilah manusia yang dapat menerima perbedaan. Pengalaman di kampus yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, dapat menjadi basis bersikap. Membayangkan semua orang sependapat dengan kita ibarat mimpi dengan mata terbuka alias tidak mungkin.

Setiap orang mempunyai asal yang berbeda, pengalaman lampau yang beragam, dan aspirasi yang bervariasi. Saya pastikan, tidak mungkin menghilangkan semua perbedaan tersebut. Persatuan bukan dibentuk karena semua seragam, melainkan atas dasar saling

menghormati perbedaan dan sepakat mengedepankan persamaan.

Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam sejak berdiri. Tugas kita saat ini merayakan kekayaan tersebut dengan merajut menjadi tenun kebangsaan yang menyatukan.

Ketiga, kedepankan pendekatan ilmiah dalam melihat banyak hal. Perbedaan pendapat pada tahun politik pasti ada. Itu sangat wajar. Ketika itu terjadi, kembalikan kepada ilmu. Biarkan ilmu yang membimbing kita dalam bersikap dan mengambil keputusan. Jangan sampai emosi dan perasaan lebih mendominasi.

Inilah tantangan pada era pascakebenaran seperti saat ini. Tidak selalu mudah memang, ketika sentimen kita dimainkan dengan beragam algoritma. Namun saya yakin, ketika banyak di antara kita melantangkan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan banyak hal, *insya Allah* itu akan menjadi modal untuk kemajuan pada masa depan.

Pendekatan ilmiah akan menjadikan hati kita tetap dingin karena mempertontonkan argumentasi logis. Itu juga akan mendidik bangsa ini menjadi lebih dewasa dalam berdemokrasi.

Semoga kita sebagai bangsa makin dewasa dalam berdemokrasi. Saya berharap, Saudara semua akan menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Sambutan pada acara wisuda Universitas Islam Indonesia,
3 Desember 2022.

5. Pancasila dan Masa Depan Indonesia

Saya ingin memulai tulisan ini dengan ilustrasi sederhana.

Kepentingan Bangsa

Bayangkan, kita diminta mengisi sebuah stoples dengan pasir, kerikil, dan batu besar sepenuh mungkin. Satu atau dua komponen saja tidak mungkin memenuhinya.

Dengan menggunakan akal sehat, tampaknya kita sepakat jika kali pertama memasukkan pasir, stoples tidak akan penuh. Begitu juga jika kerikil menjadi pilihan pertama. Batu besar tidak akan mendapatkan tempat.

Untuk memenuhi stoples, batu besar harus didahulukan. Kemudian, kerikil akan mengisi rongga yang tersisa. Selanjutnya, pasir akan memastikan rongga yang ada terpenuhi semua.

Sekarang, bagaimana kalau batu besar kita ganti dengan kepentingan bangsa, kerikil dengan kepentingan kelompok, dan pasir sebagai kepentingan personal anak bangsa. Saya yakin setiap di antara kita dapat memahami dengan mudah metafora ini. Untuk menjadi bangsa yang

utuh, kita tahu kepentingan mana yang perlu kita dahulukan, yaitu yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Berbekal perspektif itu, misalnya, kita akan lebih mudah memahami ketika Bung Karno mengusulkan dasar negara dimulai dari nilai yang mengikat persamaan sebagai sebuah bangsa. Pada sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan lima dasar negara, yakni (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kebangsaan Indonesia yang mengandaikan kesetaraan sebagai anak bangsa diletakkan paling awal. Perspektif itu tentu jangan lantas dimatikan dengan pertanyaan: berarti agama nomor sekian?

Saya hanya ingin menegaskan, ketika menyampaikan hal tersebut, Bung Karno sebagai tokoh bangsa berdiri di atas semua anak bangsa, bukan sebagai wakil golongan tertentu, apalagi mewakili sebuah keluarga.

Pancasila sebagai Pemersatu

Bagi saya, apa yang disampaikan Bung Karno itu telah diwakafkan untuk bangsa ini, dan tak seorang pun berhak mengklaim menjadi miliknya sendiri, apalagi memonopoli tafsir. Pendekatan monopolistik ini akan justru menjadi bahan bakar pembelahan di tengah publik: kami dan mereka, *minna wa minhum*. Itu tidak sehat dalam praktik berbangsa yang beradab.

Tentu itu bertentangan dengan ide menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang senantiasa

berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi dan pemikiran publik. Selera dan tantangan zaman selalu berubah. Masa kini berbeda dari masa silam. Masa depan sangat mungkin, untuk tidak mendahului Tuhan, berbeda dari masa kini.

Apakah Pancasila masih mampu beradaptasi dengan perubahan? Saya secara personal masih sangat optimistis, nilai-nilai abadi yang terkandung di dalam Pancasila masih relevan. Tentu dengan tafsir-tafsir progresif yang sensitif dengan perubahan, dan tidak menjadikan Pancasila terkerangkeng di dalam sangkar waktu lampau yang menjadikannya usang.

Kita telah sepakat, Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia, yang tersusun atas komponen bangsa yang penuh warna. Indonesia adalah negara perjanjian dan persaksian, *daru al-ahdi wa al-syahadah*. Bagi saya, Pancasila ibarat ikatan yang kuat, *mitsaq ghalidl*, dan dapat tetap aktual sebagai panduan dan rujukan dalam berbangsa dan bernegara.

Tanpa mengurangi rasa syukur atas capaian kolektif, daftar pekerjaan rumah bangsa ini pada masa datang masih panjang. Kita bisa sebut beberapa, antara lain ketimpangan, korupsi, intoleransi dan pembelahan bangsa, oligarki kuasa, dan kualitas demokrasi yang menurun.

Pekerjaan rumah itu dapat kita perpanjang, termasuk mengikutkan isu-isu global yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan bersama sebagai warga bumi. Antara lain, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, serta konflik di banyak belahan bumi.

Apakah Pancasila masih relevan menjadi basis dan rujukan pada masa depan? Saya yakin kuliah umum yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Yudi Latif akan mendiskusikan isu ini dengan tajam.

Sambutan pada pembukaan Kuliah Umum untuk mahasiswa program profesi, magister, dan doktor bertajuk "Pancasila dan Masa Depan Indonesia" oleh Yudi Latif, Ph.D., 5 November 2022.

6. Takdir Sebuah Bangsa

Setiap bangsa mempunyai takdir masing-masing. Dalam lintasan takdir tersebut, ada pasang naik dan pasang surut. Ada pencapaian yang perlu dirayakan dan krisis yang perlu ditangkis. Krisis dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti serangan negara lain, atau juga gejolak internal, seperti sengkarut politik domestik.

Sebagian krisis terjadi secara tiba-tiba, sisanya bertahap. Sebagian bangsa bisa keluar dari krisis dengan cepat, sebagian lain berjuang untuk waktu yang lebih lama.

Perjuangan beragam bangsa untuk keluar dari krisis didokumentasikan secara *ciamik* dalam buku *Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis* karya Jared Diamond (2019). Di sana ada kisah kebangkitan Finlandia setelah diserang Soviet dan narasi transformasi di Jepang selepas kekalahannya pada Perang Dunia Kedua.

Ada juga di dalamnya cerita tentang kebangkitan Indonesia bakda percobaan kudeta pada 1965 dan juga pengalaman Chile sehabis mengalami masalah domestik berkait dengan kudeta militer. Di bagian akhir buku juga dikisahkan bagaimana Jerman dan Australia bangkit dari krisis yang terjadi secara perlahan.

Saat ini, krisis masih berlangsung di beberapa negara. Bahkan krisis bisa terjadi lintas negara alias mengglobal. Termasuk antara lain berkait dengan ketidakadilan, imigrasi lintas negara karena konflik, pasokan energi yang makin terbatas, manajemen sumber daya alam, perubahan iklim, dan juga polarisasi sosial karena faktor politik.

Krisis Afganistan

Saya menduga apa yang terjadi di Afganistan dapat dimasukkan ke dalam situasi krisis. Dan, itu sudah berlangsung lama. Meski, sebagian orang mungkin menganggapnya berbeda.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada September 2021 menjadi babak baru. Apakah itu menjadi akhir krisis? Tak seorang pun tahu.

Yang jelas, pembacaan kita pada narasi yang beredar membuat kita berpikir agak mendalam. Misalnya, dengan kata kunci "Afghanistan" di laman majalah bergengsi *Foreign Affairs*, saya temukan 271 entri. Tidak semua baru. Namun, di antara tulisan yang baru, perspektif yang diangkat tidak menggambarkan optimisme. Tulisan pada 8 Desember 2022, sebagai contoh, berjudul "*When terrorists govern*" dengan kalimat pengawal artikel "*The Taliban's takeover is inspiring other jihadis*". Tulisan yang lebih mutakhir yang terbit pada 28 Maret 2022, bertajuk "*The Taliban have not moderated*" dan diikuti dengan kalimat pembuka "*An extremist regime is pushing Afghanistan to the brink*".

Saya juga memeriksa kanal majalah lain, *The Economist*. Tulisan pada 29 Januari 2022 mengusung hasil

survei, dan diberi judul agak panjang "*Afghans are more pessimistic about their future than ever*", yang dibuka dengan penjelasan ringkas "*A new survey paints a grim picture of life under the Taliban*". Atau, yang lebih hangat, pada 14 Mei 2022 sebuah tulisan yang ditayangkan berjudul "*The Taliban crave recognition but refuse to do anything to earn it*" dan dengan kalimat pengawal artikel "*Afghanistan's neighbours are wondering how on earth to deal with it*". Puluhan kepala berita lain juga mengusung tema senada: pesimisme.

Semua kisah tersebut kelabu. Itu bisa menjadi salah satu pertanda krisis, ketika kepercayaan menurun atau paling tidak dipersepsikan sedang menurun.

Merawat Optimisme

Penyelesaian krisis harus dimulai dengan *pengakuan akan keberadaannya*, diteruskan dengan *menerima tanggung jawab*, dan bukan berlagak menjadi korban dan terus-menerus menyalahkan pihak lain. Aksi itu kemudian diikuti *membuat pagar* dengan melakukan perubahan selektif dan juga bisa jadi *meminta bantuan negara lain*, plus *menggunakan pengalaman negara lain sebagai cermin* (Diamond, 2019).

Tampaknya Indonesia dapat hadir, terutama pada bagian akhir ini, untuk memberikan bantuan dan juga menjadi model pembentukan harmoni bangsa yang majemuk. Pengalaman selama ini menunjukkan, Indonesia dapat diterima oleh faksi-faksi yang bertikai di sana.

Namun, saya masih berkeyakinan, ada banyak kisah optimisme di sana, yang bisa jadi karena satu atau lain hal belum atau bahkan tidak dimunculkan oleh media.

Kekuatan media dengan keleluasaan memilih sudut pandang sangat memengaruhi kita dalam memandang suatu peristiwa.

Berkait dengan isu ini, kita dapat belajar dari perspektif Edward Said (1978) yang tertuang dalam buku terkenalnya, *Orientalism*. Di dalam buku itu, Said membahas bagaimana media Barat membingkai Timur. Dunia Islam termasuk di dalamnya. Krisis pun bisa dengan sengaja dibuat oleh kelompok tertentu. Apa yang terjadi di film, seperti *Tomorrow Never Dies*, bukan lagi isapan jempol, meski hadir dalam bentuk berbeda.

Terlepas dari beragam cerita pengikutnya, termasuk intervensi negara lain, sebuah bangsa memang harus mendesain masa depan dan memilih takdir sendiri, dengan ikhtiar terbaik.

Sambutan pembuka pada Ambassadorial Lecture
oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Afganistan
Dr. Arief Rachman M.D., 9 Juni 2022.

7. Kembali ke Fitrah Kolektif Bangsa

Manusia Baru

Ketika merayakan Idulfitri, kita diharapkan menjadi manusia baru yang makin sadar dengan tujuan asal penciptaan kita. Semangat kembali ke fitrah merupakan ikhtiar untuk membandingkan kondisi saat ini dan karakteristik manusia yang seharusnya, sifat asalnya.

Karakteristik asal ini dapat dirumuskan dengan melihat bagaimana Allah meminta manusia dalam berakhlak. Banyak sekali ayat Alquran yang mengindikasikan hal itu.

Sebagian ayat merujuk kepada fitrah personal, seperti menjadi pribadi yang jujur, mampu menahan amarah, pemaaf, dan suka berderma. Sebagian perintah lain meminta manusia menjaga fitrah kolektif. Di sini ada hubungan relasional dan bahkan resiprokal dengan orang lain.

Mari kita renungkan kembali fitrah kolektif sebagai sebuah bangsa yang sangat disayang Allah dengan tebaran nikmat luar biasa di bumi Indonesia. Hanya, sering kali, kita lupa untuk selalu bersyukur kepada-Nya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga telah menjadi saksi sebagian anak bangsa yang telah merusak jalinan solidaritas sosial dan tenun kebangsaan. Dan, bisa jadi kita juga menjadi pelaku, baik yang tanpa sadar maupun bahkan melakukan dengan kepongahan.

Hal itu bisa dilakukan, baik ketika berinteraksi secara fisik maupun di dunia maya. Ujaran kebencian dan kebohongan yang berlalu-lalang di media sosial, seakan menjadi kelaziman. Banyak di antara kita yang tidak sadar akan akibatnya. Dampaknya bisa sangat dahsyat: dari tali silaturahmi terputus, martabat saudara terhina, hingga keselamatan jiwa terancam.

Semua itu tak mungkin hadir tanpa intervensi manusia melalui jemarinya yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Mahakuasa.

Fitrah Kolektif

Sebagai ungkapan syukur kita pada hari yang mulia ini, mari kita sejenak kembali menengok pesan suci Allah di dalam Alquran yang *insya Allah* akan membimbing kita kembali ke fitrah kolektif sebagai bangsa.

Pertama, perbedaan asal bangsa dan suku adalah *sunatullah*. Itulah fitrah kolektif manusia. Kita diminta oleh Allah untuk saling mengenal dengan baik (*lita'arafu*) (QS Hujurat 49: 13). Saling mengenal merupakan fitrah kolektif manusia.

Mengenal dengan baik dapat memberikan beragam manfaat. Rasulullah bersabda, "Pelajarilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali

kekeluargaan, karena menyambung tali kekeluargaan itu dapat menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga, menambah kekayaan dalam harta, dan memperpanjang usia." (HR At-Timidzi, Jami' At-Thirmizi 1979).

Budaya mudik yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dapat pula dibingkai dengan hadis itu. Jika mungkin dilaksanakan, mudik adalah sesuatu yang mulia.

Dalam konteks berbangsa, pesan tersebut bisa kita ekstrapolasikan, mengenal dengan baik perbedaan yang ada antarkelompok atau antarsuku akan memperkukuh persatuan bangsa yang akan diliputi kedamaian. Ujungnya adalah kesejahteraan kolektif bangsa, karena kegiatan ekonomi dan aktivitas pembangunan lain tidak mungkin dapat dijalankan tanpa suasana damai.

Meski demikian, sebagai mukmin, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi sumber kemuliaan di sisi Allah adalah tingkat ketakwaan kita (QS Hujurat 49: 13), yang tertanam di dalam hati dan tercermin melalui tindakan.

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." (HR Muslim, Shahih Muslim 2564c)

Kedua, manusia tidak kalis dari kesalahan. Interaksi dengan manusia lain menjadi wasilah untuk saling mengingatkan dan menasihati. Saling menasihati ini melengkapi keimanan dan amal kebajikan yang dilakukan (QS Al-Ashr 103: 1-3). Saling menasihati merupakan fitrah kolektif.

Paling tidak terdapat tiga ranah kerja resiprokal ini yang disebutkan oleh Alquran, yaitu saling menasihati untuk (a) menaati kebenaran (*tawashau bi al-haq*), (b) menetapi kesabaran (*tawashau bi al-shabr*), dan (c) menebar kasih sayang (*tawashau bi al–marhamah*) (QS Al-Ashr 103: 3; QS Al-Balad 90: 17).

Menaati kebenaran terwujud dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Menetapi kesabaran dijalankan atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan ketika menegakkan kebenaran. Menebar kasih sayang dilakukan kepada sesama di muka bumi.

Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang penuh kasih akan selalu dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihi makhluk yang ada di langit." (HR Abu Dawud, Sunan Abi Dawud 4941).

Dalam konteks berbangsa, saling menasihati harus terus dilakukan dengan cara yang sopan, elegan, dan konstitusional. Itulah perintah untuk menaati kebenaran.

Meski demikian, jangan sampai pesan untuk perbaikan menghilangkan optimisme akan masa depan bangsa. Masih terlalu banyak sisi baik yang bisa kita syukuri. Inilah ujian kesabaran.

Karena itu, semua ikhtiar saling menasihati harus tetap dibingkai dengan semangat kasih sayang. Kritik harus dilandasi rasa cinta kepada bangsa dan negara. Untuk menjaga fitrah kolektif manusia, Allah juga menurunkan petunjuk dalam bentuk larangan.

Ketiga, salah satu penyakit hati terbesar manusia adalah terjangkit kesombongan. Beragam kisah didokumentasikan Alquran tentang bagaimana nasib umat terdahulu yang sombong dan menolak kebenaran.

Manusia yang sombong biasanya juga mempunyai kebiasaan merendahkan orang lain. Mereka melupakan fitrah kolektif manusia untuk tidak saling mengolok-olok, tidak saling mencela, dan tidak saling memberikan label buruk.

Ajaran Islam sangat jelas, sebening kristal, berkait dengan ini. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Hujurat 49: 11).

Hanya kesombonganlah yang menutup hati kita untuk menerima pesan mulia itu. Beragam dalih pun akhirnya tak jarang dibuat sebagai pembenar atas pilihan sikapnya.

Dalam konteks berbangsa, akhir-akhir ini, tidak sulit menemukan bukti sesama mukmin telah saling mengolok-olok, saling mencela, dan saling memberikan panggilan buruk, seperti kecebong atau kadal gurun (kadrun).

Terkadang kita lupa, praktik pengabaian fitrah kolektif itu telah melahirkan jiwa tuna-empati yang menikmati musibah yang menimba saudaranya sebangsa. Muruah saudara seakan tidak berharga sama sekali dan karena itu selalu dihinakan.

Dalam tataran kolektif, praktik itu telah menjadikan bangsa Indonesia terjebak segregasi dan bahkan polarisasi sosial tak berkesudahan. Energi produktif bangsa pun bocor tak terkendali. Jika sebagian kita menjadi bagian dari ini semua, mari sudahi. *Na'udzu billahi min dzalik.*

Keempat, hati yang kotor biasanya sulit percaya pada orang lain. Prasangka buruk (*suuzan*) kepada orang lain menjadi sesuatu yang lazim dan bahkan dipelihara. Akibatnya, tak jarang mencari kesalahan orang lain menjadi kegemaran.

Fitrah kolektif untuk saling berprasangka baik (*husnuzan*) sudah diabaikan. Padahal, pesan Allah sangat jelas, "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." (QS Al-Hujurat 49: 12).

Bahkan Allah memberi metafora yang sangat menjijikkan: berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing ibarat memakan daging mayat saudara.

Dalam konteks berbangsa, perlu menumbuhkan bersama-sama budaya baru untuk saling mengasah kepercayaan. Jikapun saudara kita membuat kesalahan, harus kita pahami hal itu tidak lantas menghapus semua kebaikan yang sudah dia lakukan.

Sikap untuk selalu berupaya objektif berbasis fakta terverifikasi perlu terus kita gaungkan untuk menilai banyak hal. Kebencian kita kepada seseorang atau kelompok tertentu jangan sampai menjadikan kita tidak bisa bersikap adil (QS Al-Maidah 5: 8).

Kelima, Allah memerintah kita berkolaborasi dengan sesama. Saling menolong adalah fitrah kolektif manusia. Namun batasannya sangat jelas, saling menolong harus dibingkai dalam kebajikan.

Ajaran Islam sangat jelas. Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS Al-Maidah 5: 2).

Dalam konteks berbangsa**,** kita sering kali dituntut menentukan bersikap untuk mendukung atau bahkan bekerja sama. Dengan bingkai nilai tersebut, seharusnya kita tidak salah melabuhkan pilihan.

Seharusnya kita tidak mendukung tindakan yang melawan hati nurani bangsa dan mencederai rasa keadilan publik. Praktik korupsi atau perusakan lingkungan adalah contohnya. Kerakusan individu atau kelompok yang mengabaikan kepentingan publik sudah seharusnya tidak mendapatkan tempat. Pintu kerja sama untuk hal seperti itu sudah seharusnya tertutup rapat.

Ringkasan

Sebagai pengingat bersama, mari kita ingat kembali beberapa perintah Allah untuk menjaga fitrah kolektif kita sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa.

Pertama, saling mengenal dengan baik untuk menguatkan tali silaturahmi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperpanjang usia.

Kedua, saling menasihati untuk menaati kebenaran, menetapi kesabaran, dan menebar kasih sayang.

Ketiga, tidak saling mengolok-olok, mencela, dan memberikan label buruk.

Keempat, tidak saling berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing.

Kelima, saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan tidak saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Mari, semua kita ikhtiarkan secara kolektif untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kualitas seorang hamba yang menentukan posisi kita di hadapan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Ringkasan khotbah Idulfitri 1443 di Masjid Ulil Albab,
Universitas Islam Indonesia, 1 Syawal 1443/2 Mei 2022.

8. Kesadaran Berbangsa

Di satu sisi, Saudara adalah individu yang terus berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, Saudara adalah anggota masyarakat yang merupakan bagian anak bangsa.

Karena itu, perlu terus memelihara kesadaran kebangsaan. Selalulah bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang bisa Saudara kontribusikan untuk kebaikan bangsa ini. Bisa mulai dari hal kecil hingga sangat besar pada saatnya kelak.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Saudara melakukan refleksi bersama. Masih banyak pekerjaan rumah kolektif yang perlu kita perhatikan. Beberapa berkait dengan ketimpangan di banyak sektor, korupsi yang seakan tak ada habis, kelestarian lingkungan yang makin terancam, sampai dengan ancaman keterbelahan bangsa sebagai residu proses politik yang belum dewasa.

Kita tidak mungkin hanya menyerahkan masalah itu kepada negara, meski dalam beberapa masalah, negara harus hadir dengan nyata. Namun kita pun secara kolektif bisa berkontribusi.

Mari kita lihat, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Namun, dalam tulisan ringkas ini, saya hanya ingin berfokus pada satu saja: ancaman keterbelahan bangsa.

Keterbelahan Bangsa

Residu dari proses politik beberapa tahun terakhir telah menggiring banyak bangsa di dunia ke keterbelahan atau polarisasi. Indonesia tak terkecuali. Dan, bisa jadi kita menjadi bagian dari proses itu, meski kadang tidak menyadari atau dengan jemawa bahkan justru membuat beragam dalih untuk membenarkan. Opini dan perasaan lebih mengedepan dibandingkan dengan fakta. Inilah era pascakebenaran.

Fenomena itu memantik kesadaran bersama, ternyata banyak di antara kita belum siap berdemokrasi secara dewasa. Meski sebagian bisa kita pastikan langsung bersuara tinggi dan tidak rela jika dianggap demikian.

Berdemokrasi secara dewasa membutuhkan beragam prasyarat, termasuk kemampuan berpikir mandiri dan tidak terjebak narasi publik, serta siap berbeda pendapat dengan tetap menghargai pihak lain. Hanya dengan demikian, persatuan bangsa dapat kita jaga dan energi bangsa tidak bocor karena sesuatu yang kurang bermakna. Kehadiran media sosial tidak bisa kita pisahkan dari fenomena keterbelahan bangsa. Karena itu, saya mengajak Saudara memikirkan beberapa isu berikut.

Memahami Penyebab

Media sosial memungkinkan kepalsuan pengguna dan informasi. Siapa pun bisa membuat akun dan membuat serta menyebarkan informasi, termasuk kita. Sebuah pesan bersirkulasi secara cepat tanpa bisa dikendalikan setelah diunggah.

Pada waktu lampau yang menantang adalah mendapatkan informasi. Saat ini, sebaliknya, informasi melimpah. Tantangan berubah, yaitu menyaring informasi. Karena itu, saya mengajak Saudara peduli terhadap masalah ini. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan menjadikan etika sebagai pengendali. Bisa jadi peran itu berkesan kecil, tetapi jika kita lakukan secara kolektif, dampaknya bisa luar biasa.

Mengapa? Gerakan kolektif bisa mengubah algoritma media sosial bekerja yang antara lain mengandalkan algoritma rekomendasi (*recommendation algorithm*). Suara lantang, seperti disimbolkan *trending topics* atau *trending hashtags*, akan memengaruhi yang lain.

Algoritma rekomendasi melalui gelembung tapis (*filter bubble*) juga yang menjadikan kita terpapar informasi yang sudah terpilih berdasar perilaku daring lampau dan profil kita. Jangan heran, misalnya, jika hari ini kita mengetik "sepatu kulit" di mesin pencarian sebuah platform media sosial, beberapa hari ke depan tawaran sepatu kulit membanjir. Gelembung tapis telah memilihkan informasi bagi kita.

Hal itu bukan tanpa masalah dalam konteks berbangsa. Inilah juga yang menjadikan jurang keterbelahan makin menganga, karena kita hanya akan

diberi informasi yang sesuai dengan prakonsepsi awal kita, dan paparan terhadap informasi dengan perspektif lain menjadi sangat terbatas.

Sebuah ruang gema (*echo chamber*) terbentuk. Kita hanya mendengarkan "suara kita" sendiri, atau suara yang sama dengan suara kita. Kita pun akhirnya terjebak pada bias konfirmasi yang menjadikan kita hanya percaya dengan informasi yang sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya.

Saudara, kesadaran tersebut perlu kita ingat terus untuk menjadi warga negara yang dewasa, pemikir mandiri yang berani bersikap, tidak menjadi buih yang terombang-ambing ombak narasi publik, sekaligus sanggup hidup dalam harmoni meski berbeda pilihan.

Ringkasan sambutan pada acara wisuda doktor, magister, sarjana, dan diploma Universitas Islam Indonesia, 30 Juli 2022.

9. Melawan Algoritma

Algoritma dan Keputusan Kita

Dalam tulisan singkat ini, saya ingin mengajak pembaca untuk melakukan refleksi atas perkembangan mutakhir yang berlangsung dalam keseharian kita. Karena, acap kali, ketidaktahuan atau ketidakmampuan telah menjadikan kita menerima begitu saja tanpa pernah berusaha membebaskan diri darinya.

Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita sadar, banyak di antara keputusan sehari-hari kita dipengaruhi oleh algoritma yang dikembangkan dalam berbagai aplikasi yang kita gunakan, termasuk media sosial?

Sebelum melanjutkan, mari kita pahami bersama apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah. Kita menggunakan algoritma dalam banyak tindakan sehari-hari, dari memasak mi instan sampai mengambil keputusan untuk kebaikan bangsa. Di sana ada urutan logis langkah-langkah yang harus diikuti.

Nah, aplikasi komputer pun menggunakan algoritma yang mengolah data menjadi informasi, yang diwujudkan dalam bentuk kode atau program yang dipahami oleh mesin.

Keputusan kita yang dipengaruhi algoritma yang tertanam dalam aplikasi, termasuk media sosial, dapat mewujud dalam beragam bentuk, dari keputusan yang berkait dengan berita yang kita baca, teman yang kita kontak, mobilitas fisik yang kita lakukan, hingga bahkan barang atau layanan yang kita gunakan atau beli.

Tentu, hal itu tidak selalu berarti buruk. Namun ketidaksadaran akan mengenai hal itu bisa menjadikan kita dikendalikan oleh algoritma yang tidak semua kita tahu arahnya.

Algoritma Rekomendasi dan Beberapa Ilustrasi

Mari kita ambil beberapa ilustrasi. Apakah kita pernah mencari sebuah produk di media sosial? Katakanlah kita sedang mencari sepeda elektrik. Meskipun kita tidak jadi membeli, jangan heran jika dalam beberapa hari selanjutnya iklan sepeda elektrik akan sering muncul di layar kita.

Mengapa hal itu dapat terjadi? Aplikasi merekam setiap aktivitas kita dan karena itu mengetahui preferensi atau profil kita. Iklan produk yang sesuai dengan profil kita akan sering tampil di layar kita. Itulah algoritma rekomendasi melalui gelembung tapis (*filter bubble*) yang memilihkan informasi bagi kita.

Apa masalahnya? Keputusan yang kita buat tidak selalu rasional. Banyak di antaranya bersifat impulsif alias tergantung pada stimulus eksternal.

Hal itu mirip dengan kejadian ketika kita pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk mencari produk A.

Namun ketika ada paparan informasi produk lain yang memberikan banyak diskon, kita tergoda untuk membeli. Paparan yang berulang dengan informasi tertentu akan mengubah persepsi kita dan akhirnya dapat mengarahkan perilaku kita.

Hal serupa juga terjadi ketika kita membeli sebuah produk di toko daring. Sebagai contoh, ketika membeli sebuah buku dengan judul tertentu, berdasar algoritma tertentu, toko daring memberi informasi buku dengan judul lain biasanya juga dibeli oleh pembeli buku dengan judul yang kita pilih. Toko menawarkan produk dalam bentuk paket atau bundel. Sialnya, tawaran tersebut sering kali sayang kita lewatkan jika dibarengi dengan diskon menarik. Lagi-lagi, perilaku kita diarahkan oleh algoritma.

Selama beberapa waktu kemudian, setelah pembelian buku itu, jangan kaget jika mendapat penawaran buku lain melalui email yang terkirim secara otomatis. Sekali lagi, kita digoda oleh algoritma.

Sekarang, kita ganti buku dengan barang-barang keseharian lain, seperti pakaian dan produk gaya hidup lain. Bisa jadi, sebagian di antara kita menganggap itu masalah lumrah, yang ujung terburuknya adalah perilaku konsumtif. Namun ingat, perilaku konsumtif (bukan konsumerisme) dapat mengalihkan prioritas pengeluaran kepada pos yang tidak penting, dan mengabaikan yang lebih penting. Terlepas dari itu, perilaku kita sangat mungkin diarahkan oleh algoritma tetap valid.

Kamar Gema dan Manipulasi Opini

Saya ingin membawa pelajaran ini ke konteks lain, berkait dengan keterpaparan informasi yang sudah disaring oleh algoritma rekomendasi.

Perilaku daring dalam memilih konten yang kita akses dan baca akan direkam oleh aplikasi. Ketika kita sering membaca berita baik tentang tokoh B, misalnya, jangan kaget jika melalui algoritma rekomendasi kita akan ditawari banyak berita baik tentang tokoh itu. Paparan kita terhadap berita baik tokoh lain, akibatnya menjadi sangat terbatas.

Ketika kita mencintai seorang tokoh, akan sangat muncul rasa cinta kita makin tinggi. Di sisi lain, ketika kita membenci tokoh pesaing, rasa benci itu akan menggunung. Semua itu karena informasi yang sudah tersaring.

Pun demikian yang terjadi di berbagai grup media sosial. Grup itu seakan mengikuti algoritma natural dan hanya orang-orang yang cenderung menggunakan perspektif yang berkumpul. Yang tidak, biasanya tidak diundang ke dalam grup atau bahkan dikeluarkan dari grup atau diputus pertemanannya.

Akibatnya dapat ditebak. Informasi pendukung perspektif grup tersebut akan makin banyak dibagikan. Akhirnya, sebuah kamar gema (*echo chamber*) terbentuk. Kita hanya mendengar "suara kita" sendiri, atau suara yang sama dengan suara kita.

Kita pun akhirnya terjebak pada bias konfirmasi yang menjadikan kita hanya percaya dengan informasi yang sesuai dengan yang kita yakini sebelumnya, dan cenderung tidak percaya informasi dengan perspektif lain, meskipun

informasi tersebut valid (Greenhill & Oppenheim, 2017; Davies, 2018).

Algoritma itulah yang berandil dalam membuat keterbelahan di tengah bangsa, ketika ada kontestasi politik, seperti pemilihan kepada daerah atau bahkan pemilihan presiden. Sialnya, kita tidak sadar persepsi kita tentang suatu kejadian atau seorang tokoh dapat digiring oleh algoritma.

Ketidaksadaran itu akhirnya memperdalam jurang keterpecahan antarkelompok anak bangsa. Yang makin mengkhawatirkan adalah sentimen antarkelompok itu terus dilanggengkan dan bahkan makin mengkristal dari waktu ke waktu.

Algoritma itu pun tak jarang justru dimanfaatkan untuk menggiring opini khalayak, termasuk dengan melibatkan pasukan siber. Pasukan itu ditugasi mengamplifikasi pesan yang beredar secara masif dan mendominasi ruang digital. Di sinilah penggiringan opini terjadi.

Studi yang dilakukan tim Universitas Oxford (Bradshaw, Bailey, & Howard, 2021) menemukan, pada 2020 aktivitas pasukan siber telah berlangsung di 70 negara. Pasukan siber tidak hanya melibatkan pengguna manusia, tetapi juga akun terotomatisasi atau robot politik (*political bots*) untuk mengamplifikasi pesan dengan cepat. Penggunaan akun terotomatisasi untuk manipulasi opini publik ditemukan di 57 negara, termasuk Indonesia (Bradshaw, Bailey, & Howard, 2021).

Profil dan Penggiringan Perilaku

Selain algoritma yang memfasilitasi amplifikasi informasi untuk memanipulasi opini publik, pengendalian perilaku kita juga dapat disebabkan oleh pemanfaatan profil kita.

Karakteristik personal dan rekaman aktivitas daring, termasuk hubungan yang kita jalin dan percakapan yang kita lakukan, bisa dijadikan untuk menentukan profil kita, yang akan berasosiasi dengan preferensi kita atas banyak hal, termasuk pilihan produk dan politik (Kietzmann *et al.*, 2012).

Kita bisa ambil contoh dari Amerika Serikat (AS). Pada pemilu 2016, ditemukan keterlibatan perusahaan Cambridge Analytica yang membantu kampanye seorang calon presiden, dengan menambang data dari Facebook. Data dari 200.000 pengguna Facebook digunakan untuk membuat profil psikologis terperinci terhadap 87 juta pengguna (Heawood, 2018).

Data tersebut kemudian digunakan untuk *microtargeting* kampanye. Ada beragam bahaya praktik itu, termasuk potensi untuk mengeksploitasi data personal, menutup karakteristik informasi yang sebetulnya iklan politik, informasi yang diterima secara privat tidak mudah dikoreksi, informasi yang diterima secara privat mungkin tidak benar, dan memungkinkan partai politik membuat janji politik yang berbeda-beda tergantung pada profil personal (Heawood, 2018).

Penyalahgunaan data itu diungkap oleh mantan pegawai Cambridge Analytica dalam sebuah wawancara.

Skandal itu melibatkan Facebook. Facebook melalui CEO Mark Zukerberg meminta maaf ketika dimintai keterangan oleh Kongres AS. Pada Juli 2019, Facebook didenda 5 miliar dolar AS karena pelanggaran privasi (Wong, 2019).

Apakah penggiringan perilaku seperti itu terjadi di Indonesia? Meskipun tidak suka, praktik seperti itu juga ditemukan di Indonesia dalam beberapa kasus (lihat misalnya Sastramidjaja & Wijayanto, 2022).

Tawaran Perlawanan

Apa yang mungkin kita lakukan untuk melawan manipulasi opini dan penggiringan perilaku oleh algoritma dari banyak aplikasi yang kita gunakan? Kita bisa ungkap beberapa inisiatif.

Pertama, kita harus menyadari setiap aplikasi menggunakan algoritma tertentu yang tidak semua arahnya kita ketahui. Ada nilai atau kepentingan yang ditanamkan. Kesadaran itu akan menjadikan kita selalu terjaga dan menjauhkan kita dari bersikap seperti anak kecil yang polos.

Karena itu, setiap pengeklikan yang kita lakukan, seharusnya kita dahului dengan refleksi dan pilihan sadar tentang dampaknya. Jangan terlalu mudah mengeklik atau membagikan informasi yang tidak jelas validitas dan manfaatnya.

Kedua, kita perlu melatih diri menjadi pemikir mandiri yang tidak mudah diombang-ambingkan narasi publik, termasuk informasi yang direkomendasikan oleh beragam aplikasi.

Tentu, menjaga independensi seperti itu tidak selalu mudah. Dalam konteks ini, tingkat asupan individu terhadap informasi benar yang beragam dan pendidikan yang baik, akan mempermudah seseorang menjadi pemikir mandiri.

Mengapa itu penting? Studi menemukan, banyak keputusan kita yang tidak didasari rasionalitas individu, tetapi dipengaruhi oleh narasi kelompok (Sloman & Fernbach, 2017).

Ketiga, secara kolektif kita harus melantangkan konten yang baik dan informasi yang benar. Penyebaran informasi salah atau hoaks, tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan.

Karena itu, pelantangan konten baik dan informasi yang benar akan melawannya di ruang publik. Ada koreksi secara kolektif, sehingga diharapkan persepsi publik bisa dikembalikan ke arah yang benar. Koreksi kolektif itu juga memanfaatkan algoritma rekomendasi yang membuat pesan menjadi dominan.

Meski demikian, kita perlu menyadari, koreksi informasi salah yang beredar tidak serta merta bisa mengoreksi informasi yang salah (Nyhan & Reifler, 2010; Flynn *et al.*, 2017). Informasi pengoreksi pun tidak dapat menjangkau semua orang yang sudah terpapar informasi yang salah tersebut. Lebih jauh lagi, informasi salah yang sering terbaca, apalagi jika berasal dari sumber yang dianggap kredibel, lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan informasi benar yang jarang menyapa (Swire *et al.*, 2017).

Epilog

Bahwa algoritma yang tertanam dalam beragam aplikasi, termasuk media sosial, telah mengarahkan perilaku kita adalah fakta. Namun kita secara kolektif dapat "melawan" supaya menjadikan setiap pilihan dan keputusan dalam hidup kita makin didasari refleksi yang cukup dan argumentasi rasional.

Tanpa perlawanan, hidup kita akan digiring oleh algoritma. Jangan lupa, algoritma juga buatan manusia. Manusia jenis ini tak jarang ingin mengeksploitasi manusia lain, baik secara finansial maupun politik. Itulah yang oleh Zuboff (2019), profesor dari Universitas Harvard, disebut kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*). Karena itu, semboyan kuasai data untuk menguasai dunia valid adanya, dan akan sangat berbahaya jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang memuliakan manusia.

Saya berharap, tulisan singkat ini bermanfaat dalam memantik kesadaran kolektif kita akan bahaya "menyerahkan hidup" kepada algoritma.

Rangkuman orasi ilmiah dalam acara Wisuda Ke-14 dan Peringatan Dies Natalis Ke-23 Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, 3 Oktober 2022.

10. Bersama dalam Perbedaan

Premis yang saya percayai sampai hari ini bahwa perbedaan atau keragaman adalah keniscayaan. Keragaman adalah fakta sosial. Kita tidak mungkin menutup mata darinya. Bahkan, keragaman merupakan *sunatullah*. Dan, Allah meminta manusia untuk saling mengenal dengan baik (*lita'arafu*). Karena itulah, semua ikhtiar untuk membuat yang beragam menjadi seragam, akan "melawan" *sunatullah*.

Isunya tidak lagi bagaimana menyeragamkan, tetapi bagaimana menyikapi keragaman. Penyeragaman dalam banyak kasus tidak operasional dan bahkan kontraproduktif.

Bagaimana jika terjadi perbedaan? Sikap kita terhadap keragaman bisa dibingkai dengan beberapa prinsip, termasuk berpikiran terbuka, saling memahami, dan saling menghormati.

Berpikiran Terbuka

Sejarah mencatat, Islam dapat berkembang dengan pesat karena keterbukaan sikap. Kehadirannya dapat bersanding dengan peradaban lain. Ketika Zaman Keemasan, misalnya sebagai ilustrasi, banyak ilmuwan

nonmuslim terlibat aktif di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, Baitul Hikmah.

Selain itu, pemahaman bahwa tidak semua yang berbeda selalu berdiri diametral, perlu kita lantangkan. Kita bisa bersama dalam perbedaan. Itu prinsip penting. Yang berbeda bisa jadi saling melengkapi atau saling menginspirasi.

Kita ambil beberapa contoh.

Apakah manusia selalu rasional? Beberapa teori berangkat dari premis itu, termasuk Teori Agensi. Namun ada teori lain yang memberikan ruang terhadap pendapat bahwa manusia tidak selalu rasional, termasuk Teori Institusional. Bahkan, Dan Ariely (2008), ekonom perilaku, melabeli *Preditably Irrational* sebagai judul bukunya yang memotret perilaku manusia.

Apakah keduanya bisa digabungkan? Sebagian ilmuwan mengatakan bisa, sebagian lain berpendapat berbeda. Namun kedua teori itu dapat menjadi lensa analisis untuk konteks berbeda.

Bahkan pengembaraan pendek saya ke berbagai bacaan menemukan ada isomorfisme, kesamaan pola atau irisan, di banyak pemikiran dan bahkan disiplin. Konsep isomorfisme dikemukakan oleh von Bertalanffy (1968), biolog Austria, penggagas Teori Sistem Umum (*General System Theory*).

Kita mengenal model komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan derau (*noise*). Model itu dikembangkan Berlo pada 1960. Apakah kita tahu, jika

model itu berawal dari model matematika yang dikembangkan Shannon pada 1948?

Atau jaringan saraf tiruan, model matematika yang dikembangkan McCulloch dan Pitts (neurofisiolog dan ahli matematika) pada 1943, didasari pada cara kerja saraf secara biologis. Atau, algoritma genetika yang dikembangkan Holland pada 1970-an. Idenya algoritma pencarian berbasis populasi, ketika model deterministik terlalu mahal. Ada representasi gen atau kromosom di sana, seleksi, persilangan, dan mutasi.

Saling Memahami dan Menghormati

Ada kalanya sintesis terhadap beragam pemikiran tidak bisa dilakukan. Tidak masalah. Apalagi jika memang keduanya berpijak dari asumsi berbeda.

Jika itu terjadi, memupuk semangat saling memahami diperlukan. Kita dapat bersepakat dalam perbedaan.

Dalam konteks ini, yang bisa dilakukan adalah menemukan bingkai bersama yang menegaskan posisi masing-masing, termasuk mencari irisan sekecil apa pun. Secara visual, hal itu dapat dilakukan dengan menggambarkan dalam kontinum konsep, kontinum waktu, diagram kartesius, tabel dua dimensi, atau bahkan diagram venn.

Saya yakin, hanya dengan saling memahami secara tulus, semangat saling menghormati bisa muncul. Ujungnya adalah iklim kondusif untuk menghadirkan dialog yang produktif dan konstruktif. Berjalan bersama seperti itu bisa dilandasi kesadaran ilmiah yang antikebenaran tunggal. Jika

memang setiap pendapat mempunyai dasar dan argumen, beri ruang untuk diterima dan berkembang.

Yang demikian itu akan menjadi jalan untuk menghormati martabat manusia lain. Dalam Islam, tidak boleh ada dalam beragama, apalagi sekadar memaksakan pendapat. Hanya dengan pendekatan itu, kemerdekaan manusia (termasuk kita) dijunjung tinggi, dan tentu saja setiap pilihan mempunyai konsekuensi masing-masing.

Sambutan pada bedah buku Agama, Filsafat, dan Ilmu Pengetahuan *yang digelar Program Studi Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Indonesia, 29 Juni 2022.*

Bagian 2 Kesadaran Warga Kampus

11. Neoliberalisme Perguruan Tinggi

Mengelola perguruan tinggi, pada masa seperti sekarang ini, tak mungkin berhasil tanpa ikhtiar sepenuh hati. Beragam tantangan terhampar di depan mata, yang mengharuskan respons secara tepat.

Perubahan lanskap lapangan permainan yang sangat cepat telah menghadirkan beragam dilema yang memerlukan pemikiran ekstra untuk membuat pilihan yang bermartabat.

Beberapa dilema terlihat komplementer, saling melengkapi, tetapi di tataran operasional, tak jarang, pilihan harus diambil, karena sumber daya yang terbatas. Situasi menjadi makin sulit, jika pilihan yang ada bisa saling menegasikan atau bersifat diametral yang berpotensi melanggar nilai-nilai fondasi perguruan tinggi.

Izinkan saya berbagi perspektif untuk satu dilema yang berkait dengan pilihan pijakan dalam mengelola perguruan tinggi.

Gaya Neoliberal

Jika kita sikapi secara kritis dan jujur, banyak praktik pendidikan tinggi di Indonesia, dan juga belahan dunia lain,

terjebak pada pijakan neoliberalisme. Indikasinya beragam, termasuk korporatisasi perguruan tinggi dengan segala turunannya.

Sebagai contoh, perguruan tinggi hanya dianggap sebagai penghasil lulusan, sebagai bagian dari mesin produksi, dan bukan manusia yang harus dimuliakan semua potensi kemanusiaannya. Akibatnya, materi menjadi ukuran dominan.

Di dalam perguruan tinggi pengamal neoliberalisme, relasi antaraktor juga sangat hierarkis dan karena itu birokratis. Pemimpin perguruan tinggi seakan menjadi bos besar dengan segala titahnya. Ruang diskusi yang demokratis akibatnya tidak mendapatkan tempat. Demokrasi mati di rumah sendiri.

Dosen dianggap sebagai buruh korporat dengan segepok daftar indikator yang harus dipenuhi, dan bukan sebagai kolega intelektual yang setiap capaiannya merupakan manifestasi dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai akademisi. Praktik yang pertama bisa menjebak dosen pada mental pengguguran kewajiban, sedangkan yang kedua dapat menghasilkan entakan kuat untuk perubahan.

Mahasiswa pun tak lebih dari sekumpulan konsumen yang harus dipuaskan. Hubungan yang terjadi pun menjadi sangat transaksional. Mereka tidak dilihat sebagai pembelajar yang haus ilmu pengetahuan atau aspiran yang perlu pendampingan dalam pengembaraan intelektual.

Pijakan neoliberalisme pun dapat menjelma dengan sistem metrik untuk mengukur semua kinerja, yang

mengandaikan keseragaman dan mengabaikan idealisme, keunikan misi, dan faktor kesejarahan. Selain itu, semua yang tidak masuk metrik seakan tidak penting dan bisa diabaikan begitu saja.

Karena itu, tidak jarang beragam tindakan yang berpotensi melanggar etika pun seakan menjadi halal dilakukan selama kinerja dapat dicapai, termasuk berkait dengan pemeringkatan.

Pemeringkatan dianggap sebagai harga diri yang harus dikejar dengan segala harga, termasuk menggunakan jalan pintas dan bahkan menggunting dalam lipatan, meski kadang harus menjauhkan perguruan tinggi dari idealismenya.

"Yang lain saja melakukan" seakan menjadi alasan untuk membuat semua urusan menjadi halal. Hasil pemeringkatan pun tak jarang dikapitalisasi dengan bingkai pongah yang merendahkan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi itu seakan seperti anak kecil, yang belum *mumayiz* secara intelektual, yang naik meja di tengah kerumunan dan menepuk dada, "Akulah yang terbaik."

Autokritik dan Dilema

Bisa jadi perguruan tinggi kita juga terjebak dalam praktik seperti itu. Inilah saatnya berhenti sejenak untuk melakukan refleksi secara kolektif.

Saya sangat paham, lari dari jebakan itu tidak mudah, apalagi praktik itu seakan sudah menjadi norma baru, yang diperkuat oleh kebijakan yang mengekang, tanpa pilihan.

Namun saya termasuk yang masih menjaga optimisme. Semoga kesadaran baru segera muncul di banyak perguruan tinggi. Indikasinya pernah terlihat. Sebagai contoh, ketika tahun lalu buku besutan Peter Fleming (2021), *Dark Academia: How Universities Die*, terbit, beragam diskusi pun digelar di Indonesia.

Memang sangat mungkin kita tidak sepakat dengan setiap argumen Fleming, tetapi banyak pesan di dalamnya yang seakan menjadi *déjà vu,* "Kok rasanya pernah melihat kasus seperti itu ya."

Kalau kita mau jujur, banyak praktik yang disikapi secara kritis dalam buku itu terjadi di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri menjadi pelaku. Namun sejurus kemudian, pesan penting itu kembali terkubur di bawah kesibukan administratif luar biasa, dan praktik yang ada pun seakan kembali ke sedia kala.

Bahkan di sisi hulu, paradigma sebagai basis kebijakan pun tidak banyak berubah. Kita pun akhirnya kembali hidup tenang karena mendapatkan pembenaran.

Apakah memang itu jalan yang akan kita pilih untuk masa depan? Saya tidak menjawab di sini, tetapi membiarkan terbuka menjadi pekerjaan rumah masing-masing.

Saya percaya masa depan tidak tunggal, tetapi jamak. Karena itu, beragam imajinasi yang berangkat dari fakta mutakhir perlu kita hargai. Itulah keindahan dunia akademik, ketika beragam pemikiran mendapat tempat, selama diikuti dengan argumen yang kuat.

Sebagai tambahan pekerjaan rumah, masih banyak dilema yang bisa kita ungkap. Pertama, memberikan fokus kepada penyelesaian masalah lokal atau berjuang untuk menjadi pemain global. Kedua, meningkatkan kualitas akademik dengan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernas atau menggesernya ke komersialisasi.

Ketiga, mengejar pertumbuhan substantif yang memerlukan waktu atau pertumbuhan superfisial yang instan. Keempat, menjaga moral akademik kualitas tinggi atau sekadar menggugurkan kewajiban.

Daftar dilema itu tentu masih bisa kita perpanjang. Itu menambah daftar pekerjaan rumah untuk kita refleksikan, sebagian bagian dari kritis terhadap masa kini.

Pidato pelantikan Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, 2 Juni 2022.

12. Merawat Misi Universitas

Setiap perguruan tinggi merupakan entitas unik. Mereka lahir di ruang sejarah berbeda dan dibangun di atas kesadaran beragam, meski ada irisan di sana. Karena itu, mengandaikan keseragaman untuk semua merupakan sesuatu yang melawan fakta.

Hanya, di lapangan, kesadaran itu tidak mengemuka atau paling tidak bukan yang menggema. Selalu saja ada upaya melihatnya secara serupa.

Itulah tantangan setiap perguruan tinggi untuk kembali melakukan refleksi secara kolektif. Termasuk di antaranya untuk menemukan dan menegaskan kembali misi yang diemban. Cara paling sederhana adalah menyelisik nilai-nilai yang diyakini dan ditanamkan oleh para pendiri. Universitas Islam Indonesia (UII) pun tidak berbeda.

Dua Kubu

Tantangan itu makin nyata ketika ideologi baru merasuk dalam pengelolaan perguruan tinggi. Beragam predikat disematkan, dari neoliberalisme, birokratisasi, sampai dengan korporatisasi. Semua mengandung makna yang dipercaya tidak sejalan dengan idealisme atau misi asasi kehadiran sebuah perguruan tinggi.

Setiap kubu punya pendukung dan penggemar, dengan argumentasi masing-masing. Meski, keduanya pun punya irisan dalam praktik. Tentu, meja diskusi dapat dibuka. Inilah asyiknya dunia akademik, ketika beragam perspektif mendapat tempat untuk diungkap ke ruang publik.

Jika hendak menyederhanakan, pembeda kedua kubu itu adalah basis nilai yang melandasi gerak. Manifestasinya adalah beragam praktik yang sampai level tertentu dapat melupakan perguruan tinggi dari misinya.

Kita ambil beberapa ilustrasi. Kubu neoliberal mengagungkan persaingan tanpa ampun, sedangkan kubu ideal lebih menghargai persandingan alias kemitraan. Tidak jarang, atas nama persaingan, publik pun dimanipulasi dengan beragam informasi yang diglorifikasi. Etos kecendekiawanan pun tidak lagi mendapat perhatian cukup, asal peringkat perguruan tetap di pucuk. Edukasi publik seakan tidak mendapatkan tempat lagi.

Pengamal kubu neoliberal menikmati birokratisasi sebagai bos, sedangkan satunya mengedepankan semangat kolegial yang dianggap tidak modern atau bahkan tidak sejalan dengan kemajuan. Tidak jarang, pemimpin penganut kubu yang kedua dianggap pemimpin lemah karena tidak mau memaksa.

Tentu, bagi penganut setiap kubu, serangkaian kilah dapat disampaikan. Itulah keindahan otak manusia yang mampu memproduksi beragam argumentasi. Apalagi praktik kedua kubu itu tidak mempunyai garis demarkasi yang selalu tegas dan tidak saling bebas (*mutually exclusive*)

sepanjang masa. Setiap perguruan tinggi bisa jadi menjalankan praktik kedua kubu, meski nilai pijakannya tidak kompatibel. Sebagian mendasarkan pada desain sadar, sedangkan yang lain karena kekangan yang tak bisa dihindari.

Pilihan Berlabuh

UII akan berlabuh di kubu mana? Itu sebetulnya pilihan sederhana dari dua pilihan, tetapi mempunyai implikasi rumit yang tidak semua perguruan tinggi sanggup menerima. Berlabuh di kubu idealisme secara normatif benar dan sulit mencari yang tidak sepakat. Namun jika pilihan itu berimbas terhadap peringkat perguruan tinggi dengan basis sistem metrik yang cenderung abai terhadap keunikan, misalnya, keraguan pun menggelayut.

Idealisme yang menjaga semangat kolegialitas sering kali dianggap lambat dalam merespons perubahan. Keputusan kolektif sering kali dinilai terlalu banyak melibatkan kompromi politis dari beragam aktor yang terlibat. Sebaliknya, pendekatan korporat dipercaya akan menjadikan kampus makin melesat, meski tidak jarang diikuti oleh penggadaian sebagian akal sehat.

Apa jalan keluarnya? Ada masanya refleksi jujur perlu dilakukan secara kolektif dengan tabula rasa yang kalis kepentingan sesaat dan menggantikannya dengan nilai-nilai asasi. Jika itu dilakukan, akan muncul beragam jalan tengah yang disepakati dan sekaligus disadari risikonya.

Namun ada syarat mutlak untuk dapat melakukan refleksi yang bermakna. Termasuk dengan tidak

menjebakkan diri pada narasi publik. Independensi dalam bersikap memang tidak selalu nyaman, apalagi di tengah gempuran praktik neoliberalisme yang dianggap sebagai norma baru. Tidak hanya di kancah nasional dan internasional, tetapi juga di dalam kampus.

Mari lihat diskursus ini sebagai sebuah dinamika yang perlu disyukuri. Diskusi dengan hati dingin harus terus dilakukan untuk merespons perubahan yang tak henti dengan tetap merawat misi. Semoga Allah senantiasa memudahkan UII.

Tulisan ini sudah dimuat di UIINews *edisi April 2022.*

13. Lincah dalam Strategi, Setia pada Misi

Tema peringatan Milad Ke-79 Universitas Islam Indonesia (UII) diambil dengan kesadaran penuh atas hasil pemindaian lingkungan internal dan eksternal. Salah satunya adalah beragam praktik manajemen perguruan tinggi (PT) di Indonesia, dan bahkan dunia, yang berideologi neoliberal. Jebakan mutakhir neoliberalisme tampaknya memang sulit dihindari. Ideologi ini seakan menjadi semacam simbol modernitas dalam manajemen PT.

Sebetulnya fenomena itu dapat dengan mudah dijelaskan menggunakan lensa teori institusional. Salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi adalah dengan mengikuti lingkungan tanpa refleksi mendalam, yang oleh DiMaggio dan Powell (1983) disebut mimetik *(mimetic)* atau bersifat koersif *(coercive)* karena dikekang oleh otoritas di atasnya.

Jebakan Neoliberalisme

Jebakan itu akan membawa kepada dua perubahan (Rosser, 2022). Pertama, PT akan mengejar menjadi universitas kelas dunia, terutama dalam konteks ukuran

metrik yang digunakan oleh pemeringkatan universitas global dan produksi tenaga terampil untuk mengisi pasar tenaga kerja. Kedua, PT berlomba-lomba mentransformasikan manajemen internal untuk menghasilkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas dengan pendekatan korporat. Secara ringkas, itulah upaya korporatisasi dan pengamalan manajerialisme *(managerialism)* yang berpotensi menjauhkan dari misi utama (Beaton, 2021; Leithwood & Hallinger, 2012).

Jebakan itu, tanpa disadari, akan mengubah pola pikir secara drastis. PT dilihat sebagai korporat yang memberikan layanan riset dan pengajaran, bukan sebagai lembaga yang fokus pada ikhtiar ilmiah pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, staf administratif dan akademik dipandang sebagai pekerja atau buruh dan bukan sebagai kolega atau intelektual atau cendekiawan. Selain itu, mahasiswa dianggap sebagai konsumen yang harus dipuaskan dan bukan aspiran yang haus didikan. Rektor dan pemegang amanah lain difungsikan sebagai manajer korporat dan bukan pemimpin intelektual (Rosser, 2022; Fleming, 2021).

Aspirasi menjadi PT kelas dunia yang ditandai oleh beragam pemeringkatan juga tidak kalis dari jebakan neoliberalisme. Jika ingin menjaga idealisme, UII sudah seharusnya tidak menempatkan pemeringkatan PT sebagai tujuan, tetapi hanya sebagai dampak samping karena kita mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. UII seharusnya berfokus pada pertumbuhan substantif yang sejalan dengan

misinya, dan tidak justru disilaukan oleh pembangunan citra (Lynch, 2015).

Pilihan Sikap

Rekognisi nasional atau internasional perlu dirayakan seperlunya dan tidak perlu diglorifikasi secara berlebihan, apalagi dengan jemawa dan merendahkan PT lain.

Itu adalah upaya melepaskan diri dari neoliberalisme yang, antara lain, memberikan ruang sempit kepada aksi kolektif-kolegial (yang digantikan oleh aksi elitis) dan norma kultural (yang ditimpa oleh insentif ekonomi) (Rodrik, 2017).

Di satu sisi, beragam strategi pertumbuhan yang diambil UII sudah seharusnya diikhtiarkan untuk tetap lincah, terutama pada masa menantang seperti ketika terjadi pandemi Covid-19. Namun di sini lain, misi utama UII haruslah dijaga dengan penuh kesadaran supaya tidak terjebak pada narasi publik yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini UII.

Menemukan kombinasi ideal kedua sisi itu tidaklah selalu mudah. Perlu pemikiran mendalam dan juga konsensus beragam aktor. Pilihan itu pun bukan tanpa risiko, ketika pendulum narasi publik menuju kepada arah lain.

Beragam pemikiran kritis seperti yang diusung Fleming (2021) sering kali hanya seksi untuk waktu terbatas, dan pudar bersama kemerambatan waktu. Ide-ide relevan menjadi tidak laku ketika berbeda dari selera pasar. Meski demikian, pemikiran Fleming (2021) harus tetap dikaji secara kritis.

Peringatan milad kali ini dapat menjadi momentum penegasan kesadaran kolektif semua warga UII untuk menjaga nilai-nilai abadi yang ditanamkan oleh para pendiri, 79 tahun lalu.

Elaborasi ringan dari bagian Laporan Perkembangan Universitas Islam Indonesia (UII) 2021 yang disampaikan pada Rapat Terbuka Senat dalam rangka Milad Ke-79 UII, 1 Maret 2022.

14. Menjadi Ahli yang Bermakna

Izinkan saya, pada saat berbahagia ini, untuk berbagi perspektif yang semoga relevan untuk kita semua, dan terutama para profesor, yang ahli di bidang masing-masing.

Matinya Kepakaran

Lima tahun lalu, pada 2017, Oxford University Press menerbitkan sebuah buku yang langsung menjadi pergunjingan publik di banyak pojok dunia, termasuk Indonesia. Buku itu ditulis Tom Nichols (2017), berjudul *The Death of Expertise*, matinya kepakaran. Meskipun didasari kasus di Amerika Serikat, topik yang dibahas sangat relevan untuk konteks lain, termasuk Indonesia.

Beragam informasi di dalam buku tersebut memerlukan benang merah untuk memahami. Misalnya, buku ini melacak mengapa kepercayaan terhadap para ahli menurun. Isu kemembanjiran informasi salah atau hoaks di internet juga dibahas. Peran ahli seakan sudah tergantikan oleh orang banyak, dengan beragam mekanisme. Salah satunya, karena informasi beragam subjek yang tersedia di kanal publik, terutama internet. Di sini, jurnalisme dianggap mempunyai peran penting karena menjadi jembatan antara para ahli dan publik.

Ilustrasi yang diberikan untuk dunia kampus pun serupa. Mahasiswa dapat merasa sudah menyamai para dosen atau profesor yang sudah mendalami topik bahasan cukup lama. Yang menarik, Nichols, penulis buku, menghubungkan fenomena sebagai akibat tren mutakhir, yaitu pendekatan korporatisasi kampus yang melihat pendidikan sebagai komoditas dan menempatkan mahasiswa sebagai konsumen, bukan sebagai pembelajar.

Menurut saya, banyak implikasi sosiologis atas perspektif itu. Ketika mahasiswa dianggap sebagai konsumen, mereka akan memerankan diri secara berbeda ketika berhadapan dengan kampus. Pola pikir transaksional pun wajar jika mengemuka. Berbeda jika mereka menjadi aspiran dalam proses pembelajaran. Dosen atau profesor akan dilihat dengan kacamata berbeda yang lepas dari jerat transaksional.

Sebagai tambahan ilustrasi, ketika pandemi menyerang, pendapat para ahli kesehatan di Amerika Serikat, termasuk juga di Inggris dan Brasil, untuk menyebut beberapa, tidak dianggap penting sebagai basis kebijakan pemerintah (Zakaria, 2020).

Di belahan dunia lain, seperti Jerman dan Taiwan, kebijakan pemerintah secara tegas berkiblat pada sains. Mereka mendengarkan saran para ahli dengan serius dan menerjemahkan menjadi kebijakan nasional yang konsisten (Zakaria, 2020).

Beberapa Saran

Pertanyaan nakal selanjutnya, apakah pendapat ahli harus selalu didengar? Atau, apakah memang betul pendapat publik, atau mahasiswa dalam konteks kampus, tidak mengandung kebenaran? Apakah betul para ahli, termasuk profesor, menjadi kaum elite yang tidak kalis dari kritik soal kualitas pendapat akademik mereka?

Nichols, penulis buku, memberikan beberapa saran kepada para ahli. Termasuk mengajak para ahli lebih rendah hati. Mereka seharusnya tidak berlagak elitis dan tercerabut dari konteks berpijak.

Selain itu, para ahli juga diharapkan memperkaya variasi sumber informasi, supaya tidak terjebak di kamar gema (*echo chamber*) yang menjadikan narasi seakan tunggal tanpa bandingan.

Selain itu, validitas informasi perlu diperiksa secara cermat. Di sini, kita bisa menambahkan, kegagalan dalam menjalankan ini, para ahli sangat mungkin memunculkan pendapat akademik yang kurang tepat karena tanpa dukungan data yang cukup.

Di sisi lain, fenomena ini juga menantang para ahli untuk lebih sering melantangkan beragam pendapat intelektual secara jujur dan relevan dengan kebutuhan publik. Sensitivitas intelektualisme perlu terus diasah.

Namun di sini, jebakan lain bisa muncul, karena terkooptasi oleh kuasa lain, termasuk kuasa uang dan kuasa politik (lihat misalnya Dhakidae, 2003). Jika itu terjadi, pendapat ahli dapat menjadi tumpul dan tidak lagi jujur, karena mengikuti pesan sponsor.

Pelajaran yang dituliskan Fareed Zakaria (2020) dalam buku *Ten Lessons for A Post-Pandemic World*, seakan merangkum narasi yang disampaikan Nichols. Berdasar kasus Amerika Serikat ketika melawan pandemi Covid-19, Zakaria mengemukakan, khalayak, termasuk pemerintah, harus mendengarkan para ahli dan para ahli juga harus mendengarkan khalayak.

Saya tambahkan di sini, semua perlu dilakukan dengan kejujuran. Pelajaran ini valid juga untuk konteks Indonesia dan banyak belahan bumi lain.

Hanya dengan demikian, kehadiran para ahli menjadi bermakna dan pendapat mereka menjadi bernas dan relevan, karena didasari pemahaman yang mendalam dan mutakhir atas konteks. Sangat jelas, para profesor adalah bagian dari para ahli.

Semoga Allah meridai UII dan kita semua.

Sambutan pada acara Serah-Terima Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor untuk Prof. M. Syamsuddin, S.H., M.H., 31 Maret 2022.

15. Doktor Baru dan Pendekatan Interdisipliner

Nikmat yang Mengalir

Hanya kepada Allah kita bersyukur atas beragam nikmat yang mengalir tak henti diberikan kepada keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII). Ikhtiar dan iringan doa terbaik telah mengantarkan banyak capaian pada 2022. Semua adalah buah kerja kolektif.

Dari sisi kelembagaan, sejak 28 Desember 2022, UII kembali mendapatkan akreditasi institusi Unggul yang berlaku sampai 2027, lima tahun ke depan. Dari 54 program studi yang UII kelola, 36 program studi mendapatkan akreditasi A atau Unggul. Itu setara dengan 66,67% dari keseluruhan program studi. Jika enam program studi baru yang berakreditasi minimum tidak diikutkan, persentase yang berakreditasi A atau Unggul bahkan mencapai 75,00%.

Dari sisi kualifikasi dosen, makin banyak dosen berkualifikasi lektor kepala atau profesor. Khusus untuk profesor, saat ini UII mempunyai 29 dosen dengan jabatan akademik profesor. Saat ini, lebih dari 10 pengusulan profesor sudah disetujui oleh senat universitas dan sudah dikirim oleh UII untuk diproses lebih lanjut oleh negara.

Sekali lagi, ini adalah capaian kolektif yang harus kita syukuri.

Cacah dosen UII yang menyelesaikan doktor pun terus bertambah. Dengan memasukkan 18 doktor baru yang kita sambut hari ini, saat ini, 31,95% (248 dari 776) dosen UII telah berpendidikan doktor. Persentase ini jauh melampaui rata-rata nasional yang baru 13,98% (42.825 dari 306.150 dosen).

Rasa syukur kita pun seharusnya bertambah karena pada akhir 2022, 166 dosen UII sedang menempuh program doktor di berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri. Jika semua berjalan lancar, dalam empat tahun ke depan, cacah dosen berpendidikan doktor UII akan mencapai lebih dari separuh (53,35%; 414 dari 776).

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada 18 doktor baru yang telah menyelesaikan studi pada 2022. Studi doktoral bukan tanpa tantangan. Memang banyak cerita membahagiakan bisa dibagi, tetapi saya yakin semua doktor baru menyimpan sisi menantang yang tidak semua nyaman untuk mengisahkan.

Studi yang Tuntas

Di Amerika Serikat studi terhadap sekitar 50.000 mahasiswa doktoral dari 30 lembaga menemukan, tingkat kesuksesan menyelesaikan studi doktoral bervariasi dari 49% sampai 64% bergantung pada disiplin (dikutip Young *et al.* 2019). Studi di konteks Eropa pun menghasilkan temuan serupa. Hanya 54,3% mahasiswa doktoral berhasil menyelesaikan misi mereka (Wollast *et al.*, 2018).

Temuan tersebut berarti paling tidak satu dari tiga kandidat doktor harus menyerah dan gagal di tengah jalan. Sayang, data serupa dari Indonesia tidak bisa saya temukan.

Karena itu, dengan kesadaran bahwa tidak setiap yang mempunyai kesempatan studi doktoral bisa tuntas, rasa syukur pun seharusnya bertambah karena telah ditakdirkan oleh Allah menyelesaikan satu tahap studi dengan baik, dengan segala cerita yang menyertai.

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada keluarga, program studi, jurusan, dan fakultas terkait. *Insya Allah*, akumulasi kepakaran ini akan menjadi modal penting untuk terus berkembang dan menebar manfaat lebih luas.

Perspektif dan Riset Interdisipliner

Izinkan saya pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini berbagi sebuah perspektif yang mudah-mudahan bisa memicu diskusi lanjutan yang lebih produktif. Saya yakin, kita akan mudah bersepakat jika masalah yang dihadapi umat manusia makin kompleks, makin banyak variabel yang terlibat dengan skala yang sangat bervariasi.

Kompleksitas masalah itu membutuhkan pendekatan baru dalam menyelesaikan. Salah satunya adalah dengan melibatkan beragam kepakaran terkait untuk mendesain solusi yang efektif. Dalam bahasa konsep, itu disebut dengan pendekatan interdisipliner.

Pendekatan itu tidak hanya didasari keragaman disiplin yang terlibat (yang bisa disebut sampai tingkat multidisipliner), tetapi mengharuskan ada irisan

antardisiplin. Paling tidak ada tiga argumen untuk menguatkan pendekatan itu.

Pertama, masalah yang kompleks tidak bisa dipecahkan oleh disiplin tunggal. Kedua, penemuan dan kemajuan dalam riset lebih sering terjadi di perbatasan antardisiplin. Ketiga, interaksi antarperiset interdisipliner akan bermanfaat untuk memperluas perspektif dan memperjauh horizon.

Data yang dilaporkan majalah sains terkemuka *Nature* (van Noorden, 2015), berdasar 35 juta artikel dari 14 disiplin dan 143 keahlian mengindikasikan, sejak pertengahan 1980-an muncul kecenderungan peningkatan cacah publikasi interdisipliner. Indikasinya adalah sitasi terhadap literatur di luar disiplin. Temuan tersebut valid, baik di bidang sains alam maupun sains sosial. Data yang disajikan menunjukkan sepertiga referensi artikel ilmiah berisi literatur dari disiplin lain (Ledford, 2015).

Apakah riset interdisipliner juga mendapatkan tanggapan yang baik?

Data menunjukkan, publikasi interdisipliner memerlukan waktu cukup untuk menunjukkan relevansi dan menjadikannya disitasi. Temuan menyarankan untuk lebih berfokus pada riset interdisipliner yang tidak terlalu banyak disiplin terkait, dibandingkan dengan yang melibatkan terlalu banyak disiplin yang berjauhan.

Analisis juga menemukan kecenderungan riset interdisipliner berbeda antara satu negara dan negara lain. Berdasar artikel yang dipublikasikan Elsevier, India adalah negara yang menghasilkan paling banyak riset

interdisipliner, disusul China, Taiwan, Korea Selatan, Brasil, Italia, dan Amerika Serikat (van Noorden, 2015).

Bagaimana di Indonesia?

Tidak ada data yang bisa diakses untuk memberikan gambaran besar. Namun ada banyak kisah yang tidak selalu membahagiakan berkait dengan riset interdisipliner di Indonesia. Salah satunya adalah soal pengakuan komunitas.

Meski pesan riset interdisipliner sering kita dengar, ketika terjadi di lapangan dan didokumentasikan dalam publikasi, sering kali ada "sengketa" berkait dengan relevansi disiplin dan bahkan soal pengakuan kelayakan menjadi syarat dalam kenaikan kewenangan akademik. Itu adalah pekerjaan rumah bagi kita, untuk mengedukasi diri sendiri.

Setiap kali ada masalah "sengketa disiplin", saya teringat kisah ketika mengambil mata kuliah intensif di Universitas Malmo, Swedia, Mei 2012, tentang manajemen publik. Seorang pengajar yang berlatar belakang lebih dekat dengan ilmu politik menceritakan dengan mata berbinar dan bahagia ketika artikelnya tentang pengelolaan sampah diterima di jurnal bereputasi dengan cakupan di bidang teknik. Bagi dia, hal itu adalah tantangan untuk membingkai riset dan menyajikannya dengan tepat, sehingga diterima oleh komunitas disiplin lain.

Memang ada argumen lain yang kurang setuju. Alasannya termasuk bahwa riset interdisipliner akan membocorkan waktu, dana, dan juga sumber daya lain (Duerr & Herkommer, 2019).

Pada kesempatan ini, saya mengajak semua doktor baru untuk merenungkan bagaimana perspektif dan riset interdisipliner bisa dijalankan dengan baik dan produktif.

Sambutan dalam penyambutan 18 doktor baru
Universitas Islam Indonesia, 29 Desember 2022.

16. Kepengikutan yang Efektif

Setelah wisuda, sebagian besar di antara Saudara akan memasuki dunia berkarya. Ada beragam pilihan, bekerja di perusahaan atau lembaga yang sudah ada, membuka usaha mandiri, atau meneruskan studi. Itu soal pilihan personal dengan kemantapan hati dan argumen masing-masing. Tak seorang pun bisa memaksakan. Ini soal pembagian tugas peradaban yang saling melengkapi.

Kepemimpinan dan Kepengikutan

Ketika menjalankan beragam peran tersebut, kecakapan kepemimpinan (*leadership*) sangat penting. Namun, pada sambutan yang singkat ini, izinkan saya berbagi sebuah perspektif tentang sebuah isu berkait dengan kepemimpinan yang jarang dibahas, yaitu kepengikutan (*followership*).

Kita mulai dari ilustrasi sederhana.

Siapa yang membuat para Youtuber atau selebgram dianggap berhasil? Beragam jawaban mungkin muncul, tetapi saya yakin semua sepakat: salah satu yang terpenting adalah pengikut (*follower*). Atau lebih tepat, pengikut yang efektif: mereka aktif sekaligus independen.

Bayangkan, jika para pengikut tersebut pasif dan mudah dipengaruhi untuk pindah ke lain hati, keberadaannya tidak akan banyak membantu para Youtuber atau selebgram untuk mendapatkan penghasilan, karena tidak ada keterlibatan (*engagement*) dari pengikut. Atau, bisa jadi, keberadaannya justru membuat gaduh dengan beragam umpan balik yang tidak diinginkan.

Nah, demikian juga dalam sebuah konteks organisasi atau komunitas. Kepemimpinan tanpa kepengikutan yang efektif tidak akan berjalan dengan baik.

Pemimpin atau pengikut adalah soal pembagian peran yang komplementer dan sekaligus temporer. Bisa berubah kapan saja. Seorang pemimpin di sebuah konteks, bisa menjadi pengikut di konteks lain. Karena itu, penting untuk melihat bahwa kedua peran itu sejajar dan dinamis. Kedua peran itu harus dapat dimainkan dengan baik.

Ada kalanya, ketika dalam posisi pemimpin, kita harus sadar akan semua sikap yang harus diambil. Salah satunya adalah membuat bingkai, dengan beragam inisiatif, termasuk menunjukkan jalan, mengumpulkan sumber daya, mengetahui dan memitigasi risiko, menunjukkan komitmen untuk mencapai misi, mendorong keragaman informasi yang masuk, menghargai kontribusi, dan memperjelas wilayah kerja (Hurwitz & Hurwitz, 2018). Pemimpin yang baik harus meyakini bahwa dia memiliki pengikut yang hebat.

Di sisi lain, pengikut akan melengkapi dengan menjalankan beragam aksi termasuk memahami apa yang dicari, mengetahui dengan tepat waktu yang dipunyai,

berkolaborasi dengan yang lain, menghargai ide orang lain, dan dapat diandalkan.

Di Luar Kotak, di Dalam Bingkai

Daftar itu dapat kita perpanjang dan detailkan. Namun ada satu poin penting yang bisa menjadi pengingat bersama, berkait dengan inovasi. Inovasi adalah kreativitas yang terjual atau diterima untuk digunakan. Di sini, istilah berpikir di luar kelaziman (*thinking outside the box*) menjadi relevan.

Dalam konteks relasi pemimpin dan pengikut, berpikir di luar kelaziman harus dilakukan keduanya. Pemimpin menggunakan untuk mendefinisikan bingkai, dan pengikut menggunakan untuk menjalankan aksi. Nah, ketika pengikut berpikir kreatif dan mengembangkan inovasi, harus tidak keluar bingkai yang disepakati.

Hal itu penting dipastikan supaya relasi yang ada menjadi produktif untuk kemajuan organisasi dan tidak justru menyemai konflik yang berpotensi menggeser organisasi dari misi yang diformulasikan dan disepakati.

Sebagian besar di antara Saudara sangat mungkin ketika memasuki dunia berkarya, pada tahap awal, akan memerankan sebagai pengikut. Ingatlah poin ini: sadar posisi, menjadi pengikut yang efektif, dengan memahami bingkai yang dibuat pemimpin, dan mengeksekusi beragam aksi secara inovatif, tetapi tetap di dalam bingkai yang disepakati.

Menjadi pengikut yang efektif merupakan salah satu jalan menjadi pemimpin.

Untuk meningkatkan kualitas kepengikutan, semua pelajaran etika dan akhlak baik yang didapatkan di bangku kuliah dalam mewarnai setiap aksi yang Saudara lakukan ketika berkarya.

Ringkasan sambutan pada Wisuda Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Islam Indonesia, 28 Mei 2022.

17. Mahadata (Tuna)Nilai

Tidak sulit bagi kita untuk sepakat, perkembangan mutakhir telah menyadarkan kita akan peran penting data. Sebagai ilustrasi, pada 2017, misalnya, majalah *The Economist* menurunkan sebuah artikel berjudul berupa penegasan itu: sumber daya paling berharga di dunia tidak lagi minyak bumi, tetapi data. Data adalah minyak bumi pada era digital.

Artikel tersebut juga menuliskan contoh pemain raksasa dunia yang mengandalkan data dalam menjalankan proses bisnis, termasuk Alphabet (perusahaan induk Google), Amazon, Apple, Facebook, dan Microsoft.

Manfaat Data

Data yang melimpah (mahadata) telah mengubah karakteristik kompetisi bisnis. Lapangan permainan pun berubah. Penguasaan data menjadikan pemain bisnis makin kuat.

Sebagai contoh, para perusahaan raksasa tersebut mendapatkan manfaat luar biasa dari efek jaringan (*network effects*): makin banyak pengguna sebuah layanan kian menarik bagi orang lain untuk mendaftar. Dengan mengumpulkan data, perusahaan dapat meningkatkan

produk, menarik makin banyak pengguna, dan akhirnya mengumpulkan makin banyak data lagi. Proses itu bersifat iteratif-progresif.

Akses kepada data juga memproteksi perusahaan dari pesaing. Pengintaian yang mungkin dilakukan oleh para raksasa itu dapat memindai perilaku pengguna: Google tahu apa yang orang cari, Facebook tahu apa yang orang bagi, Amazon tahu apa yang orang beli, dan seterusnya. Pengenalan pola itu yang membuat mereka bisa memprediksi masa depan.

Tak jarang, berdasar data yang mereka punya, para raksasa itu juga mengakuisisi perusahaan rintisan dengan ide cemerlang yang kelak menjadi pesaing. Akuisisi Facebook terhadap Whatsapp adalah contoh.

Nilai yang Terlewat

Kisah seperti di atas banyak menghiasi diskusi kelas dan ruang publik. Itulah fakta sosial yang tidak bisa ditampik. Nyata adanya. Namun, ada satu aspek yang sering kali terlewat, yaitu soal nilai (*values*) yang membingkai.

Penguasaan atas data yang melimpah dan tak terbendung terbukti telah melahirkan kapitalisme jenis baru, yang oleh Shoshana Zuboff, profesor dari Universitas Harvard, disebut kapitalisme pengintaian (*surveillance capitalism*).

Kapitalisme pengintaian merupakan sistem ekonomi yang menangkap dan menjadikan data personal sebagai komoditas untuk mendapat keuntungan ekonomi. Data digunakan untuk memprediksi masa depan. Beragam aspek

terlibat di sini, termasuk pemanfaatan data untuk pemasaran produk dan bahkan untuk manipulasi opini dan perilaku pengguna.

Dalam konteks inilah, nilai sebagai basis etika menjadi sangat penting. Dengan harapan, supaya penambangan data tidak menjadi sarana eksploitasi antarmanusia untuk mengeruk sebanyak mungkin keuntungan, baik secara finansial maupun politik.

Para perusahaan raksasa itu merupakan contoh konkret bagaimana data yang ditambang dengan baik memberikan pertumbuhan luar biasa. Di bidang bisnis, misalnya, Amazon menguasai separuh pengeluaran belanja daring di Amerika Serikat.

Di bidang politik, skandal Cambridge Analytica yang membantu kampanye Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 bisa menjadi contoh. Data dari 200.000 pengguna Facebook digunakan untuk membuat profil psikologis terperinci 87 juta pengguna. Data tersebut didapatkan tanpa persetujuan (*consent*) pengguna. Itulah contoh bagaimana data disalahgunakan, karena pengabaian nilai.

Tentu masih banyak deretan contoh lain yang dapat diberikan.

Bingkai Nilai

Nilai dalam konteks ini menjadi semacam bingkai (*frame*). Ibarat lukisan, nilai adalah pigura. Beragam nilai abadi kemanusiaan dapat didaftar di sini, termasuk keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.

Pemikiran inovatif dalam pengumpulan dan pemanfaatan data, atau penambangan data, adalah contoh berpikir di luar kotak (*out of the box*). Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menegaskan bahwa berpikir di luar kotak sangat dianjurkan, tetapi harus tetap di dalam bingkai.

Inovasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data tidak boleh melanggar nilai-nilai abadi. Jika disepakati, Forum Pendidikan Tinggi Statistika (Forstat) dapat mengidentifikasi nilai-nilai abadi yang akan dijadikan bingkai bersama.

Nilai-nilai yang disepakati itulah yang akhirnya perlu ditanamkan dalam proses pendidikan. Dengan harapan, proses pendidikan akan menghasilkan para ahli statistika atau saintis data yang memegang nilai yang kuat.

Hanya dengan inilah, data akan menjadi berkah dan meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan, karena bermanfaat bagi banyak orang.

Bukan sebaliknya, data yang melimpah justru menjadi musibah kemanusiaan, karena menjelma menjadi sumber ketimpangan dan alat eksploitasi manusia terhadap manusia lain. Itulah yang terjadi jika mahadata tunanilai. Semoga bukan itu kasusnya.

Sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional Forum Pendidikan Tinggi Statistika (Forstat) yang dituanrumahi Universitas Islam Indonesia, 21 Mei 2022.

18. Kekuatan Cendekiawan

Publik menggantungkan harapan tinggi kepada para cendekiawan untuk kebaikan bangsa ini. Ketika gagasan bernas untuk penyelesaian beragam masalah riil tidak mungkin, tak jarang para cendekiawan akhirnya menjadi sasaran kritik.

Sejarah mencatat, cendekiawan selalu di dalam lingkaran utama dan menjadi penggerak, bersama dengan aktor-aktor lain, setiap perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Mari sejenak kita refleksikan fenomena itu.

Cendekiawan mempunyai posisi penting karena beragam kekuatan yang mereka sandang. Berikut tiga di antaranya.

Kekuatan Moral

Cendekiawan diharapkan dapat mengawal perjalanan bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita luhur dan konstitusi. Cendekiawan sudah seharusnya sensitif atas masalah yang muncul.

Karena itu, cendekiawan harus meniup peluit ketika bangsa atau negara terpeleset atau tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Tiupan peluit harus dilantangkan, tetapi tetap dengan santun, elegan, dan konstitusional.

Dengan kekuatan itu, sudah seharusnya independensi cendekiawan menjadi terjaga dan tidak bisa terbeli. Jangan sampai cendekiawan tidak membela yang benar, tetapi justru membela yang membayar.

Kekuatan Gagasan

Selama sebuah bangsa dan negara masih berlangsung, masalah dipastikan menjadi bagian yang inheren. Ada dinamika di sana.

Di sini, cendekiawan harus berperan memberikan kontribusi pemikiran yang jujur dan objektif. Pemikiran itu harus melampaui kepentingan sesaat, apalagi sesat, karena ada anasir jahat yang menyertai, termasuk kepentingan lain yang menjadikan kepentingan bangsa dan negara menjadi nomor sekian.

Kerja sama lintas disiplin pun menjadi niscaya, ketika masalahnya multidimensi yang tidak bisa diteropong hanya dengan satu lensa. Sekat-sekat imajiner kaku disiplin harus dibongkar. Kosakata baru harus diperkenalkan, yaitu kepentingan bangsa.

Kekuatan Perekat

Cendekiawan dengan ilmu dan objektivitas yang dimiliki dapat menjadi jembatan penghubung, tali pengikat, keragaman. Itu fakta sosial. Sejak berdiri, Indonesia ditenun dari keragaman.

Persatuan yang dibutuhkan tidak lantas menghapuskan fakta sosial itu. Saling menghormati dalam kehidupan berbangsa menjadi sangat penting. Ketika

bangsa mengidap sindrom keterbelahan, cendekiawan seharusnya hadir menjadi perekat.

Karena itu, di dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), kesamaan cita-cita harus dikedepankan, dan perbedaan yang tidak penting harus dikesampingkan. ICMI harus kembali menjelma menjadi rumah besar beragam pemikiran kebangsaan.

Daftar kekuatan itu, tentu, dapat diperpanjang, karena refleksi kolektif sangat mungkin menghasilkan tilikan-tilikan baru. Kita buka ruang itu seluas-luasnya.

Elaborasi ringan dari poin-poin sambutan tuan rumah pada Sarasehan Kebangsaan dan Pelantikan ICMI Orwil DI Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia, 23 Mei 2022.

19. Kecohan Visualisasi

Pertama, saya ingin memberikan selamat kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang terus menjaga dedikasi dalam menyelenggarakan the 6th Conference on Communication, Culture, and Media Studies (CCCMS 2022), mulai enam tahun lalu.

Konferensi itu menjadi sangat penting untuk mempresentasikan temuan-temuan penting riset dan menguatkan komunitas akademik. Bagi saya, konferensi merupakan ritual akademik yang akan menguatkan eksistensi sebuah disiplin.

Tema yang diangkat pada CCMS 2022, *visualizing the crisis*, bagi saya, sangat penting dan menarik. Dua kata kuncinya, visualisasi dan krisis, sangat relevan untuk saat ini.

Kini, visualisasi data sudah menjadi bagian keseharian kita dalam mengonsumsi informasi. Kita mengonsumsi informasi dari visualisasi yang muncul di beragam media, termasuk koran atau majalah, televisi, dan internet.

Sudah lama dipercaya, kita akan mencerna informasi lebih cepat jika ditayangkan dalam bentuk visual dan kita akan cenderung mengingatkan lebih lama. Visualisasi seakan sudah menjadi mantra baru dalam presentasi data.

Dalam sambutan pembuka ringkas ini, saya ingin mengundang untuk memberikan perhatian kepada sisi lain visualisasi. Seperti teknologi yang lain, visualisasi juga hadir dengan sisi baik dan buruk. Sering kali, sebagian besar perhatian kita berikan pada sisi positif. Kali ini, saya ingin mengajak untuk menengok sisi negatif.

Tentu, ini bukan untuk menyebar pesimisme, melainkan justru saya ingin mengajak untuk menghindari jebakan berpikir naif, dan pada saat yang sama, melengkapi cerita visualisasi menjadi lebih utuh.

Kecohan Visualisasi

Ada beberapa kecohan (*fallacies*) dalam interpretasi terhadap visualisasi data. Mari kita ambil sebuah contoh.

Silakan amati peta dunia dua dimensi. Bandingkan ukuran benua Australia yang terletak di sisi kanan bawah peta, dan Pulau Greenland, bagian negara Denmark, yang terletak di sisi kiri atas peta.

Berdasar amatan visual, tampaknya tidak sulit untuk bersepakat: ukuran Greenland tiga kali lebih besar dibandingkan dengan Australia. Namun fakta di lapangan tidak demikian. Faktanya justru sebaliknya. Ukuran Australia lebih besar tiga kali lipat dibandingkan dengan Greenland.

Mengapa demikian? Sebagian di antara kita mungkin lupa, proyeksi Mercator dalam menjadikan peta di atas globe menjadi dua dimensi telah menjadikan wilayah yang mendekati kutub menjadi tergambar lebih besar. Sementara itu, wilayah yang berada di sepanjang garis khatulistiwa

berukuran proporsional. Negara-negara Eropa, misalnya, menjadi terlihat lebih besar.

Tanpa pemahaman yang baik soal beragam proyeksi dalam membuat peta dua dimensi, kita sangat mungkin menjadi "salah" membaca peta dunia.

Sebagai sebuah artefak visual, peta dapat menjadi senjata imperialisme, seperti senjata dan kapal perang. Ketika peta digunakan untuk mendukung kolonialisme, dan wilayah jajahan diklaim di atas dahulu sebelum betul-betul ditaklukkan, peta telah mendahului imperium, wilayah kekuasaan. Peta, karena itu, mempunyai hubungan kuat dengan pengetahuan, dan akhirnya dengan kekuasaan. Itulah kekuatan visualisasi.

Manipulasi Persepsi

Dalam visualisasi, persepsi kita dapat dimanipulasi dengan beragam cara, termasuk misalnya mengabaikan nilai basis dan memanipulasi sumbu y dalam diagram kartesius menggunakan diagram yang salah, dan memilih data secara selektif dengan pertimbangan tertentu.

Sebagai contoh, perbedaan kedua seri data menjadi tidak berbeda ketika diagram batang hanya diambil puncaknya dan menjadikan sumbu y tidak mulai dari angka nol. Atau, kecenderungan data yang menurun bisa diubah menjadi menaik hanya dengan memilih beberapa titik data yang menguntungkan. Semua bisa mengarah ke interpretasi yang salah.

Kita bisa jadi merasa kesulitan membayangkan visualisasi paragraf di atas. Ini sekaligus menjadi bukti kekuatan visualisasi yang tidak mudah digantikan oleh teks.

Karena itu, selain dapat membantu kita dalam memahami informasi dengan lebih baik, kita harus sadar visualisasi, pada saat yang sama, juga bisa digunakan sebagai kakas atau alat bantu untuk kebohongan melalui manipulasi persepsi.

Jangan-jangan, tanpa sadar, kita juga sering membuat interpretasi yang salah terhadap visualisasi data, yang dibuat baik tanpa pengetahuan yang cukup, atau yang lebih menakutkan, karena didasari niat yang "jahat" untuk mengecoh.

Elaborasi ringan dari poin-poin dalam sambutan pembuka pada The 6th Conference on Communication, Culture, and Media Studies (CCCMS 2022), yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, 14 Juni 2022.

20. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sejarah panjang manusia memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa tidak ada bangsa atau peradaban di muka bumi ini yang mampu berkembang dan berkemajuan tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Manusia adalah aktor peradaban yang menavigasi setiap perubahan. Kemampuan manusia memahami lingkungan serta merespons setiap perubahan dengan tepat dan cepat, dalam konteks ini, sangat penting.

Sumber daya manusia yang mumpuni tak mungkin lahir tanpa pendidikan berkualitas. Rumus itu valid untuk semua konteks, tak terkecuali Indonesia. Karena itu, mendiskusikan dan mengawal pendidikan menjadi sangat kritikal untuk kemajuan sebuah bangsa.

Dua Masalah

Refleksi atas kondisi mutakhir di Indonesia paling tidak memunculkan dua isu besar pendidikan nasional yang masih menyisakan pekerjaan rumah kolektif yang harus terus memerlukan perhatian bersama.

Isu pertama berkait dengan kualitas pendidikan. Beragam data yang bisa kita akses mendukung kesimpulan

yang tidak mengenakkan itu. Kualitas pendidikan Indonesia, jika dibandingkan dengan bangsa lain dalam beberapa indikator, juga belum menggembirakan.

Kualitas itu bisa berkait dengan banyak aspek, dari hulu sampai hilir. Termasuk kebijakan yang jelas dan bebas kepentingan jangka pendek, kualitas pengawal proses pembelajaran, kelengkapan infrastruktur dan fasilitas, sampai dengan kualitas dan koherensi materi pembelajaran untuk semua jenjang.

Pemerataan akses atau kesempatan adalah isu kedua. Memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah hak seluruh anak bangsa, tak terkecuali. Karena itu, ketersebaran geografik, keterjangkauan biaya, dan ketersediaan kapasitas/kursi perlu mendapat perhatian serius. Negara harus hadir di sini.

Ketika negara belum sanggup karena keterbatasan kapasitas, kehadiran masyarakat dalam membantu, perlu disambut hangat dan dirayakan. Bukan justru sebaliknya, dipersulit dengan kekangan regulasi yang menyita ruang inovasi.

Mereka juga anak kandung yang perlu mendapat perhatian seperti lembaga pendidikan yang sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai negara. Tentu, itu bukan soal di atas kertas, melainkan mewujud nyata di lapangan.

Itu semua tidak mungkin tanpa dukungan anggaran yang cukup dari negara. Alokasi anggaran yang masuk akal, penggunaan yang tepat sasaran, dan bebas kebocoran menjadi sangat penting. Apalagi ketika anggaran yang ada bahkan masih terbatas.

Tantangan zaman

Potret tersebut perlu dilengkapi peneropongan masa depan. Setiap zaman memiliki tantangan masing-masing. Apa yang valid dan cukup pada masa lalu, belum tentu relevan untuk masa kini. Demikian juga untuk masa depan.

Karena itu, untuk merespons perubahan yang sangat cepat dan menyiapkan diri untuk masa depan, perlu beragam upaya. Peta jalan yang digariskan Unesco pada 2020, dalam laporan bertajuk *Education for Sustainable Development*, dapat menjadi rujukan awal. Tentu dengan tetap membuka ruang kontekstualisasi.

Kesadaran betapa penting pembangunan yang berkelanjutan menjadi pijakan dalam mendesain peta jalan. Ada empat area prioritas, yaitu transformasi lingkungan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik, pemberdayaan dan mobilisasi pemuda, serta akselerasi aksi tingkat lokal.

Transformasi lingkungan pembelajaran dapat dilakukan dalam beberapa aspek, termasuk lingkungan pedagogi, konten pembelajaran, dampak pembelajaran, dan ujungnya adalah transformasi sosial. Semua itu harus dibingkai dengan kesadaran betapa penting pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran harus mencakup beragam dimensi: kognitif, sosial dan emosional, serta perilaku.

Pendidik yang berkualitas menjadi faktor kritikal dalam peningkatan kualitas pembelajaran secara khusus dan pendidikan secara luas. Beragam inisiatif harus diambil untuk ini, baik melalui peningkatan tingkat pendidikan,

penguasaan teknologi pembelajaran, maupun dengan kecakapan dalam memotivasi dan memberdayakan anak didik.

Perhatian lebih juga perlu diberikan kepada pemuda dan posisi sentral mereka dalam kemajuan masyarakat. Mereka anak didik yang membutuhkan fasilitasi dan aspiran yang mengharapkan pendampingan.

Selain itu, sensitivitas terhadap masalah lokal (termasuk nasional) juga perlu diasah. Hanya dengan demikian, kehadiran pendidikan menjadi relevan karena berandil untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Penjaminan kualitas artefak akademik dan lulusan, karena itu, penting untuk dipastikan.

Elaborasi ringan dari poin-poin sambutan pada seminar nasional untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang dihelat Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 16 Mei 2022.

21. Menyelisik Intelektual Publik

Fareed Zakaria (2020), jurnalis dan pemikir global, dalam bukunya *Ten Lessons for A Post-Pandemic World* menyatakan, salah satu pelajaran penting yang kita dapat selama pandemi adalah kita harus mendengarkan pendapat para ahli sekaligus juga publik biasa. Yang pertama diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang kita ambil mempunyai basis sains. Yang kedua dilakukan untuk menjaga sensitivitas kita, untuk tetap mempunyai empati.

Zakaria meminta para ahli bisa menjelaskan kepada publik. Mereka harus diedukasi untuk berpikir secara saintifik. Tentu itu bukan perkara mudah bagi para ahli. Mereka harus belajar dan menjelma menjadi intelektual publik.

Intelektual publik secara umum adalah mereka yang terdidik dalam disiplin ilmu tertentu, tetapi memutuskan untuk menulis dan berbicara ke khalayak lebih luas, di luar komunitas disiplin ilmunya. Mereka tidak harus berasal di perguruan tinggi. Semua orang dari kalangan terdidik dapat menjadi intelektual publik.

Menjadi intelektual publik bisa didorong beragam motivasi, termasuk sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau akuntabilitas intelektual.

Sejarah bangsa ini memberikan pelajaran sangat berharga. Kaum terdidik selalu hadir, dan bahkan dalam posisi terdepan, dalam setiap perubahan besar bangsa ini. Tentu itu bukan peran musiman di setiap tikungan sejarah, tetapi peran untuk setiap kesempatan.

Saya percaya, peran intelektual publik tetap valid, termasuk saat ini.

Seorang profesor, saya yakin, sudah mempunyai bekal lebih dari cukup untuk menjelma menjadi intelektual publik.

Mari, di dalam tulisan singkat ini, kita upayakan konseptualisasi sederhana.

Tingkat Intelektual Publik

Intelektual publik bisa kita bedakan berdasar tingkat hierarki. Pembedaan itu berkait dengan "keberanian" dari pagar disiplin ilmu dan pengakuan khalayak.

Pertama, mereka yang menulis dan berbicara kepada publik hanya dalam disiplin ilmunya. Mereka mengemas dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Kerumitan itu menjadi urusan para ahli, tetapi semua harus disajikan dalam kemasan sederhana dan dapat dicerna dan dinikmati publik.

Kedua, mereka yang menulis dan berbicara kepada publik tentang disiplin ilmunya tetapi mengaitkan dengan dunia sosial, kultural, dan budaya di sekitarnya. Intelektual publik yang memilih tingkat ini perlu memahami sampai

level tertentu beragam aspek di luar disiplin ilmunya. Mereka berpikir kontekstual. Kehadiran disiplin ilmu yang ditekuni didefinisikan ulang relevansinya dengan konteks kekinian.

Ketiga, mereka yang menjadi simbol dan tokoh yang berdiri tidak hanya untuk disiplin ilmu yang digeluti. Intelektual publik tingkat ini menulis dan berbicara beragam isu publik, bahkan yang tidak berkait dengan disiplin ilmu asal. Mereka dalam tingkat ini sudah membuktikan mempunyai perspektif yang luas dan horizon pemikiran yang jauh. Mereka juga mempunyai semangat mempelajari disiplin lain untuk terus bisa menjaga komunikasi antardisiplin.

Peran Intelektual Publik

Karena keragaman tingkat tersebut, peran intelektual publik menjadi sangat beragam. Peran merupakan konsep relasional yang mengandaikan hubungan intelektual publik dan objek atau aktor lain.

Berikut beberapa di antaranya. Pertama, publik sebagai ahli. Sebagai ahli, pendapat intelektual publik didengarkan, sarannya pun diperhatikan, dan mendapatkan posisi terhormat di dalam komunitas disiplin ilmu yang sangat menghargai kepakaran.

Kedua, intelektual publik sebagai penjaga gerbang pengetahuan. Penjaga gerbang pengetahuan diharuskan selalu berikhtiar menjadi yang terdepan dan rujukan pengetahuan. Untuk itu, intelektual publik juga tak lelah mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir. Juga

menjaga tetap aktif dalam komunitas disiplin ilmu terkait dapat menjadi salah satu ikhtiar.

Ketiga, intelektual publik sebagai pemikir. Sebagai pemikir, intelektual publik akan terus gelisah atas kondisi yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Karena itu, ia pun akan mencari penjelasan atas beragam masalah yang dihadapi. Intelektual publik pun kerap terlibat dalam diskusi lintas disiplin untuk memahami masalah secara lebih utuh. Pemahaman atas masalah yang baik menjadi basis untuk menawarkan beragam solusi.

Keempat, intelektual publik sebagai selebritas media. Keakraban dengan media menjadi salah satu penanda sebagai selebritas. Kemunculan pendapatnya pun ditunggu media karena penting untuk mengedukasi publik. Intelektual publik seharusnya melatih diri untuk makin piawai menyederhanakan konsep rumit supaya bisa dipahami publik. Selain itu, ia juga sensitif dengan masalah mutakhir yang terjadi.

Kelima, intelektual publik sebagai pengungkap kebenaran. Pengungkapan kebenaran ditempuh dengan melantangkan pesan secara utuh dan tidak parsial dengan bingkai kepentingan. Intelektual publik, karena itu harus menjaga integritas untuk tidak terbeli guna kepentingan sesaat atau kelompok tertentu dan mengorbankan kebaikan publik.

Daftar peran tersebut tentu tidak lengkap. Beragam peran lain terbuka untuk dimunculkan dan didefinisikan.

Sambutan pada acara serah-terima surat keputusan jabatan akademik profesor, Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.
di Universitas Islam Indonesia, 21 Juli 2022.

22. Mahadata dan Nilai Abadi

Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2022 merupakan ajang unjuk kemampuan bagi kaum muda pemilik talenta di bidang sains data. Kita berharap ajang seperti ini akan menjadikan peserta menyukai bergelut dengan data dan mengembangkan kemampuan menambang makna dari data. Data tidak berbicara sendiri dan harus "disiksa" dengan beragam kakas dan model, supaya "mengakui" pesan yang dibawa.

Seminar yang dibingkai dengan tema "Genggam Data Kuasai Dunia Menuju Era Otomatisasi" menjadi pembuka rangkaian Satria Data 2022. Tema tersebut valid dan banyak bukti yang bisa dihadirkan untuk mendukung. Namun, beberapa catatan dapat diberikan untuk memberikan arah, berkait dengan sikap kita terhadap data dan nilai yang membimbing analisis mahadata (*big data*).

Sikap terhadap Data

Pertama, mari kita konseptualisasi beragam sikap terhadap data. Sikap itu akan sangat berkait dengan keputusan yang kita buat dan berhubungan dengan data.

Paling tidak ada tiga pilihan pendekatan dalam memosisikan data dan keputusan yang kita buat. Yang

pertama, keputusan yang terdorong-data (*data-driven*). Frasa itu paling populer digunakan. Pendekatan itu digunakan untuk validasi. Namun perlu dilihat, pendekatan itu cenderung mekanis dan berdasar data yang ada, tanpa melibatkan akal sehat (*common sense*).

Sebagai contoh, keputusan memberi sanksi akademik kepada mahasiswa hanya melihat data yang ada, tanpa melihat konteks lain. Seorang mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi rendah diberi tafsir tunggal: tidak mampu secara akademik. Pendekatan terdorong-data, tidak akan melihat cerita di belakang data.

Yang kedua, mengandaikan keputusan yang kita ambil terinformasi-data (*data-informed*). Pendekatan itu menggunakan akal sehat dan melihat konteks. Di sini, kita pun berpikir kritis apakah data dapat diekstrapolasi.

Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan inovasi. Keputusan pun lebih bersifat organik, dan tidak lagi mekanis hanya berdasar data yang diberikan oleh mesin. Sebagai ilustrasi, seorang mahasiswa dengan indeks prestasi rendah bukan melulu karena bodoh, melainkan bisa jadi karena beban keluarga lain, termasuk menjadi tulang punggung keluarga.

Adapun yang ketiga, melangkah lebih jauh, yaitu keputusan yang kita ambil terinspirasi-data (*data-inspired*). Jika dalam pendekatan terdorong-data kita berusaha memahami semua ukuran metrik, dalam pendekatan terinspirasi-data ini, kita berusaha mengembangkan cerita dengan angka-angka yang tersedia.

Dalam pendekatan itu, kita pun akan mencoba menggunakan data lain untuk mencari penjelas, dan menghubungkan antartitik dari beragam tilikan yang muncul.

Berdasar pemahaman ini, kasus mahasiswa dengan indeks prestasi rendah yang menjadi tulang punggung keluarga dapat menjadi inspirasi formulasi beragam program intervensi, misalnya. Di sini, kita membangun narasi atau cerita, dan bahkan hipotesis dan mengimajinasikan kemungkinan-kemungkinan.

Nilai Abadi sebagai Bingkai

Kedua, selama ini kita cenderung lebih banyak mendengar dan membaca sisi baik mahadata, dengan segala potensinya. Namun, mahadata dan olahan turunannya bukan tanpa masalah. Ada sisi gelap yang perlu disadari dan dimitigasi (Goodwin, 2016).

Termasuk di dalamnya adalah potensi eksploitasi manusia terhadap manusia lain melalui manipulasi opini dan penggiringan perilaku. Manipulasi opini dapat dilakukan dengan penyebaran informasi bohong atau hoaks, yang diamplikasi dengan algoritma tertentu. Penggiringan perilaku juga dimungkinkan dengan penambangan mahadata.

Penggunaan pasukan siber, baik berupa manusia maupun akun terotomatisasi, untuk melantangkan pesan di dunia maya, adalah salah satu contoh (Bradshaw, Bailey, & Howard, 2021). Di samping itu, perusahaan kelas dunia yang mengumpulkan data pengguna juga sangat mungkin

terjerat dalam praktik ini, dan bisa jadi bahkan menjadi strategi bisnisnya (*The Economist*, 2017). Itulah yang oleh Zuboff (2019) disebut telah menghadirkan kapitalisme pengintaian (*surveillance capitalism*).

Karena itu, kesadaran akan nilai-nilai abadi menjadi sangat penting untuk memitigasi sisi gelap mahadata. Nilai abadi tersebut termasuk kejujuran, keadilan, dan kesetaraan.

Untuk itulah, pengajaran dan implementasi semua algoritma dalam menambang mahadata harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai. Saintis data sudah seharusnya juga orang yang antieksploitasi manusia terhadap manusia lain, baik secara ekonomis maupun politik. Kode etik untuk saintis data yang dilengkapi dengan ilustrasi kaya yang meneguhkan kesadaran perlu disusun dan dilantangkan.

Akhirnya, dengan kesadaran penuh atas beragam manfaat dari mahadata, pada saat yang sama, manusia dan kemanusiaan harus diselamatkan dari sisi gelap mahadata.

Sambutan pada pembukaan seminar nasional dalam rangkaian Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2022 di Universitas Islam Indonesia, 15 Oktober 2022.

23. Neoliberalisme dan Peran Intelektual Publik

Selamat atas amanah baru, jabatan profesor, untuk Prof. Sugini. Beliau adalah profesor ke-28 yang lahir dari rahim Universitas Islam Indonesia (UII). Saat ini, *alhamdulillah*, proporsi dosen yang menjadi profesor adalah 3,5% (28 dari 790 dosen). Secara nasional, persentase profesor baru sekitar 2% dari seluruh dosen di perguruan tinggi.

Prof. Sugini adalah profesor perempuan keempat di Universitas Islam Indonesia dan profesor perempuan pertama di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Hal ini merupakan pencapaian yang perlu kita syukuri bersama.

Saat ini, UII masih mempunyai 66 dosen bergelar doktor yang sudah menduduki jabatan akademik lektor kepala. Mereka semua para calon profesor. Semoga semua tercapai dalam waktu tidak terlalu lama.

Mendefinisikan Intelektual Publik

Jabatan akademik profesor merupakan kewenangan akademik tertinggi bagi insan akademik. Ada kuasa akademik merdeka yang menyertai.

Hal itu mengingatkan saya kepada salah satu fragmen dalam film *Spiderman*, ketika Ben Parker --paman Peter Parker alter ego Spiderman -- akan meninggal dunia. Ben Parker berpesan kepada Spiderman, "*With great power comes great responsibility*." Kuasa yang besar diiringi dengan tanggung jawab besar.

Adagium itu tampaknya relevan untuk kita renungkan pada momen yang membahagiakan ini.

Jabatan profesor merupakan kuasa akademik besar. Kehadirannya juga dibarengi dengan tanggung jawab besar. Pesan itu *insya Allah* valid untuk semua profesor, termasuk saya, dan bahkan semua dosen.

Apa tanggung jawab besar tersebut? Banyak. Salah satunya adalah menjadikan diri sebagai intelektual publik. Edward Said, yang sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul *Orientalism* (Said, 1978), mendefinisikan intelektual publik dengan sangat apik.

Dalam terjemahan dan rangkuman bebas, bagi Said (2001) dalam tulisannya berjudul "*On Defiance and Taking Positions*", intelektual publik merupakan sosok yang memenuhi berbagai kriteria. Pertama, menguasai bidang disiplinnya. Kedua, tajam dalam analisis literatur. Ketiga, melihat bahwa menjadi intelektual adalah pilihan karier.

Keempat, merasa perlu masuk ke ruang publik dan melantangkan kebenaran kepada yang berkuasa, dengan mempertanyakan, menginterpretasikan, dan memahami otoritas daripada mengonsolidasikannya. Kelima, keluar dari pagar akademik untuk menghubungkan diri,

mengafiliasikan diri, dan menyelaraskan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Keenam, berfungsi sebagai memori publik yang mengingatkan yang terlupa atau terabaikan. Ketujuh, menyampaikan hubungan kuasa dan politik yang tersembunyi dari pandangan publik. Kedelapan, memberikan alternatif terhadap kebijakan yang salah.

Operasionalisasi itu sejalan dengan konsep *ulul albab* yang sering menjadi kosakata sehari-hari di kampus kita.

Jika diringkas, intelektual publik akan selalu menghubungkan disiplin yang digeluti dengan masalah nyata masyarakat dan melibatkan diri untuk menawarkan solusi. Dalam menjalankan peran itu, paling tidak perlu dua hal. Pertama, keberanian keluar ke ruang publik dengan mengambil posisi yang jelas. Kedua, sensitivitas dalam melihat masalah publik. Intelektual publik akan memunculkan pertanyaan moral yang sering kali tersembunyi di balik keributan dan hiruk-pikuk debat publik.

Intelektual Publik di Pusaran Neoliberalisme

Dalam konteks pendidikan tinggi, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian para intelektual publik adalah jebakan mazhab neoliberalisme. Mazhab ini seakan sudah menjadi satu-satunya norma baru yang paling lazim. Kita berada di tengah pusarannya.

Berkait dengan hal ini, Henry Giroux (2015) menawarkan narasi yang penting dan relevan untuk kita simak bersama. Mazhab neoliberalisme telah memereteli

perguruan tinggi, sehingga tidak lagi menjadi situs tempat perkembangan pemikiran kritis dan menjauhkannya dari iklim demokrasi yang sehat. Pendekatan yang diadopsi oleh perguruan tinggi didorong penuh oleh ideologi pasar.

Bagi Giroux, pendidikan telah direduksi menjadi pelatihan, nilai-nilai publik ditransformasikan menjadi nilai-nilai instrumental mentah, pendidikan publik dianggap sebagai sistem operasi, yang beranggapan bahwa pemecahan masalah hanya dapat dilakukan melalui kuantifikasi, data numerik, dan hitungan-hitungan efisiensi semata.

Lebih lanjut, Giroux menuliskan bahwa mazhab neoliberalisme menganggap masyarakat adalah fiksi, tata kelola harus didorong ideologi pasar, deregulasi dan komodifikasi adalah kendaraan untuk kebebasan, kebutuhan masyarakat harus ditaruh di bawah kepentingan pribadi, budaya keuangan harus menjadi panglima dalam semua kehidupan sosial, dan pendidikan tinggi harus melayani kebutuhan korporat, dan menempatkan kebaikan publik pada posisi pinggiran.

Ujungnya, ukuran keberhasilan mewujud dalam bentuk keuntungan finansial semata. Keterlibatan dalam masalah publik dan ruang publik yang didedikasikan untuk kebaikan bersama akan dilihat sebagai hambatan menuju masyarakat yang dikendalikan oleh pasar atau alibi atas tata kelola yang tidak efisien.

Intelektual publik juga dapat bergabung dengan publik secara lebih luas untuk merespons masalah-masalah sosial, memberi bantuan kepada gerakan dan organisasi lain

yang bertujuan meningkatkan keadilan. Kadang, intelektual publik juga bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dunia yang lebih adil dan demokratis (Fung, 2011).

Pertanyaan yang relevan untuk kita ajukan kemudian: apakah masih mungkin bagi kita untuk lari dari jerat mazhab neoliberalisme yang sudah menjadi norma baru dan ideologi pasar yang sudah memengaruhi alam bawah sadar kita? Apakah mungkin, misalnya, mencari jalan tengah, dengan menjalankan praktik yang berkesan berangkat dari mazhab neoliberalisme, tetapi disuntik dengan nilai-nilai lain yang menempatkan kepentingan publik pada posisi tinggi?

Menjaga Akal Sehat

Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini secara lebih detail dan ingin menjadikan isu ini sebagai bahan refleksi bersama. Sebagai intelektual publik, sikap skeptis dan selalu mempertanyakan kemapanan menjadi bahan bakar untuk menjaga akal sehat. Tidak untuk mengedepankan sikap nyinyir, tetapi untuk senantiasa mencari peluang perbaikan pada masa depan.

Para pembaca, boleh sepakat atau tidak dengan narasi yang saya usung dalam tulisan singkat ini. Jika pun tidak, itulah keindahan dunia akademik, ketika keragaman pemikiran mendapatkan tempat selama dilandasi dengan argumentasi yang memuliakan akal sehat.

Sekali lagi, selamat. Juga kepada keluarga Prof. Sugini, suami dan anak yang selalu mendukung.

Semoga jabatan ini membuka berjuta pintu keberkahan, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi terlebih untuk lembaga dan masyarakat luas.

Semoga Allah meridai UII dan kita semua.

Sambutan pada acara serah-terima Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Profesor Dr. Ir. Sugini, M.T.
di Universitas Islam Indonesia, 15 November 2022.

24. Kosmopolitanisme dan Peradaban Islam

Bagi saya, diskusi tentang masa depan selalu menarik. Di sana ada kegalauan soal masa kini dan pengharapan baik akan masa datang.

Sikap kritis terhadap kondisi mutakhir memang harus selalu dirawat. Tanpa itu, masa depan tidak akan menggairahkan karena kita tidak akan pernah mempunyai mimpi kolektif yang perlu kita perjuangkan.

Imaji Kolektif Masa Depan

Imaji masa depan pun jangan dibayangkan tunggal, tetapi jamak alias beragam. Karena itu perlu sering dianalogkan di ruang publik. Bahkan, bagi Sardar dan Sweeney (2016), karena keragaman imaji masa depan, dialog pun tidak cukup, tetapi harus dengan polilog yang melibatkan lebih banyak perspektif.

Berangkat dari kesadaran itulah, diskusi publik kali ini digelar. Karena bentuknya adalah diskusi publik, semua hadirin juga diundang untuk berkontribusi dalam memperkaya perspektif. Proses diskusi yang melibatkan

banyak orang secara aktif sangat penting untuk membangun kesadaran bersama.

Mengapa diskusi bersama menjadi penting?

Tak satu pun kegemilangan peradaban manusia pada masa lampau merupakan kerja soliter atau prestasi seorang diri. Ia selalu merupakan akumulasi kerja bersama. Karena itu, mendesain masa depan secara kolektif menjadi sangat penting dan bahkan menjadi titik tolak kritis yang sangat menentukan.

Tanpa imaji kolektif yang disepakati, jangan heran jika sepanjang perjalanan banyak energi bocor untuk kembali memperdebatkan sesuatu yang seharusnya sudah selesai pada tahapan lebih awal.

Fragmen seperti itu dapat terus berulang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Karena itu, dalam kasus terburuk, kita seperti menaiki sepeda statis. Betul keringat mengucur deras dan energi terkuras, tetapi kita tidak pernah ke mana-mana alias jalan di tempat.

Pilihan Sikap: Bersanding atau Bertanding

Berangkat dari kesadaran itu, kita bisa mulai dengan mendiskusikan beberapa hal, termasuk kritik jujur terhadap masa kini, bayangan kita terhadap masa depan, desain anak tangga untuk mencapainya, serta kontribusi apa yang bisa kita iurkan.

Dalam konteks diskusi publik kali ini, masa depan mendapatkan tambahan predikat spesifik: peradaban Islam. Di sini, ada unsur primordialisme yang seharusnya

mengikat lebih erat, ketika orang Islam mendiskusikan masa depan, tetapi bukan tanpa jebakan.

Tentu kita sadar sepenuhnya, diskursus seperti ini bukan yang pertama. Sudah banyak literatur yang merekam pemikiran dalam topik ini.

Saya berharap kesadaran etis kolektif seharusnya dapat menjadi bahan bakar dengan daya dorong penggerak yang dahsyat. Namun, jangan lupa, umat Islam tidak sendirian di muka bumi ini. Sejak dahulu kala.

Karena itu, jangan sampai kita terjebak pada pemahaman bahwa peradaban Islam, jika kita merujuk pada Zaman Keemasan Islam ketika Eropa mengalami Zaman Kegelapan, adalah titik kilometer nol peradaban manusia. Pemahaman seperti itu hanya akan mengabarkan bahwa kita bukan pembaca yang baik dan literasi sejarah kita kurang luas. Sejarah mencatat, peradaban dunia justru saling belajar.

Zaman Keemasan Islam justru menjadi contoh yang sangat baik bahwa peradaban bisa bersanding (saling berkontribusi) dan tidak selalu bertanding (saling berbenturan). Ketika itu para ilmuwan lintas latar belakang negara dan bahkan agama dapat bekerja sama dengan baik. Kita bisa menjadikan fenomena itu sebagai ilustrasi kosmopolitanisme dalam Islam, misalnya. Tesis yang diusung Huntington (1997) tentang benturan peradaban, karena itu, sangat mungkin dibaca ulang dengan kaca mata lain.

Sebetulnya label peradaban Islam tidak dikonstruksi pada Zaman Keemasan, tetapi label yang diberikan oleh

ahli sejarah modern. Kita juga tahu, secara semiotik, tidak ada label yang bisa merengkuh semua pemahaman secara komprehensif. Selalu saja ada penyempitan dan bahkan distorsi. Karena itu, ia harus diikuti dengan definisi operasional yang memadai.

Hal itu juga berlaku untuk label yang kita gunakan hari ini, termasuk kapitalisme religius dan kosmopolitanisme. Keduanya memerlukan diskusi untuk memahami, tentu dengan ruang yang terbuka lebar untuk keragaman tafsir.

Kosmopolitanisme Islam: Hubungan dengan Liyan

Sejarah awal Islam sangat jelas memberikan pelajaran kepada kita, ajaran Islam terbuka dan inklusif. Ajaran kosmopolitanisme sudah melekat dengan Islam sejak kelahirannya. Itulah mengapa Islam bisa diterima oleh manusia dengan latar belakang berbeda dan karena itu berkembang dengan pesat. Islam bisa berdialog dan bahkan melebur dengan budaya setempat.

Hubungan Islam dan *liyan* dalam situasi damai sangat harmonis. Piagam Madinah bisa menjadi contoh konkret. Suasana saling menghargai dan bekerja sama dengan *liyan* merupakan semangat yang dibawa Islam sejak awal. Tentu pemahaman saya ini terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.

Saya tidak ingin bernostalgia dengan masa lampau, tetapi mengajak hadirin untuk sejenak menengok ke belakang dan merawat pelajaran berharga yang masih sangat relevan untuk masa kini.

Bagi saya, kosmopolitanisme Islam berangkat dari kesadaran bahwa manusia setara dan ajaran Islam bersifat merengkuh. Perbedaan adalah fakta sosial dan kehadirannya tidak lantas menjadi alasan untuk berdiri secara diametral dan selalu berbenturan. Hanya dengan penerimaan kesetaraan, diskusi dan kerja sama lintas aktor dapat dilakukan secara bermakna.

Karena itu, saya juga mengajak untuk tidak terlalu mudah "bermain sebagai korban" untuk banyak masalah yang dihadapi umat Islam. Saya khawatir, hal tersebut muncul karena kegagalan menilai diri sendiri secara jujur.

Sardar (2006), misalnya, mengingatkan kita, ada tiga masalah umat Islam: gagal mengapresiasi kekuatan diri, gagal memahami realitas dunia kontemporer, dan gagal merespons dengan cepat. Akibatnya, umat Islam terjebak dalam sikap reaktif, lari dari satu jalan buntu ke jalan buntu lain, dari satu kuldesak ke kuldesak lain.

Karena itu, melihat masa lalu secara jernih sangat penting untuk mendesain masa depan. Di sana akan kita temukan banyak mutiara yang masih valid kita jadikan rujukan, tentu dengan tafsir lebih progresif.

Kita ambil satu contoh. Apakah penguasaan kapital penting dalam sebuah peradaban? Sebagian di antara kita mungkin langsung teringat kemuliaan orang miskin yang bersyukur atau ajaran hidup sederhana. Namun jangan lupa, kemajuan peradaban memerlukan kapital.

Ketika Zaman Keemasan, misalnya, negara dan para orang kaya menunjukkan rasa gandrung terhadap pengembangan sains dengan memberikan dukungan dana

melimpah. Saat itu, salah satu episentrum pengembangan sains ada di Bagdad. Ketika krisis ekonomi melanda Irak pada abad ke-11, dukungan dana menurun drastis dan para ilmuwan pun akhirnya berpencar. Dua pilar pengembangan sains saat itu, yaitu dukungan dana dan komunikasi antarilmuwan, runtuh (Chaney, 2016).

Sejarah juga mencatat, abad ke-11 merupakan awal kemunduran peradaban Islam, yang dibarengi dengan penurunan perhatian terhadap pengembangan sains. Tentu, jika disepakati, pengembangan sains dapat menjadi salah satu inspirasi strategi kebangkitan peradaban Islam masa depan.

Sambutan pembuka Diskusi Publik "Masa Depan Peradaban Islam: Kapitalisme Religius dan Kosmopolitanisme", 1 Desember 2022.

25. Dakwah Kontekstual

Bagi seorang muslim, dakwah merupakan kerja sepanjang hayat. Potongan hadis yang berarti "sampaikan dariku meskipun satu ayat" sering dijadikan basis. Penyampaian ayat itu tampaknya bisa diartikan lebih luas, tidak hanya dalam bentuk ajakan lisan, tetapi termasuk pemberian contoh dalam aktivitas sehari-hari untuk mengedukasi orang lain tentang nilai-nilai baik dan kebenaran.

Seorang muslim yang menampilkan sikap ramah kepada sesama, dapat bermuatan dakwah. Dampak sikap ramah itu akan sangat luar biasa pada konteks ketika islamofobia berkembang pesat.

Belajar dari Salah

Mohamed Salah, pemain sepakbola muslim klub Liverpool, Inggris, yang berasal dari Mesir, merupakan contoh fenomenal sebagai ilustrasi. Kehadiran Salah di Merseyside, lokasi klub, telah berandil dalam penurunan kriminalitas sebanyak 18,9%. Cuit antimuslim di Twitter yang diunggah oleh pendukung Liverpool pun menurun 50%.

Salah yang menampilkan diri sebagai seorang ayah yang ceria dan pesepakbola yang ramah dan fantastis telah membalikkan kesan negatif terhadap Islam yang dipersepsikan menakutkan. Salah telah mengakrabkan penggemarnya dengan Islam. Kesimpulan itu didasari survei terhadap 8.000 penggemar Liverpool yang dilakukan oleh tim dari Stanford University[1].

Itulah yang saya sebut sebagai contoh dakwah kontekstual. Tentu, nomenklatur ini melengkapi pendekatan lain yang sudah ada. Cerita yang terekam Hadis ketika Rasulullah melarang sahabatnya menghardik seorang Badui yang kencing di dalam masjid di Madinah memberikan referensi penting. Justru keramahan Rasulullah kepada orang Badui, yang belum paham ajaran Islam, tersebutlah yang telah menyentuh hati.

Sesuaikan dengan Konteks

Berkait dengan isu ini, dakwah kontekstual dapat secara sederhana didefinisikan sebagai ikhtiar mengajak orang lain kepada nilai-nilai baik dan kebenaran yang disesuaikan dengan konteks: lokasi geografis dan kualifikasi personal khalayak. Ilustrasi Salah di Liverpool bisa menjadi contoh lokasi geografis dakwah dan pendekatan Rasulullah terhadap orang Badui merupakan amsal khalayak dakwah.

Ilustrasi lain bisa diberikan. Seorang penceramah di kawasan kumuh, misalnya, akan lebih terasa relevan jika

---

[1]https://www.weforum.org/agenda/2019/06/how-mo-salah-might-have-reduced-islamophobia-in-liverpool/

mengajak khalayak bekerja keras dan menyukuri nikmat yang diterima dibandingkan, misalnya, dengan tema zakat mal. Dakwah kepada orang yang belum akrab dengan ajaran Islam tentu memerlukan cara khusus, supaya tidak justru menjauh.

Rasulullah diutus dengan dua peran sekaligus: membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dalam dakwah kita beritibak kepadanya. Namun di lapangan, kita sering kali justru lebih banyak berfokus pada yang kedua, sehingga mengesankan surga menjadi sangat elitis. Kabar gembira jarang didendangkan dalam dakwah.

Ayat 125 dari Surat Al-Nahl dapat memberikan inspirasi berkait dengan pendekatan dakwah yang bisa didiskusikan dan diadopsi. Terdapat tiga pendekatan di sana: *bi al-hikmah*, *bi al-mauidlati al-hasanah*, dan *bi al-mujadalah*.

Ibarat bepergian bersama menggunakan mobil, hikmah digunakan untuk mengajak orang yang baru berjumpa untuk naik mobil. Kesan pertama haruslah baik supaya orang tergerak.

Setelah orang itu naik mobil, bolehlah kita mengenal lebih jauh. Di sini pertukaran ide baik mulai terjadi. Pendekatan *bi al-mauidlati al-hasanah* dengan pemberian nasihat, bimbingan, atau peringatan yang baik, digunakan di sini.

Ketika kedekatan sudah terjalin di dalam mobil, barulah diskusi atau debat dengan logika mungkin berlangsung dengan baik. Itulah strategi *mujadalah* yang

dapat digunakan untuk membangun hubungan yang lebih akrab.

Salah memahami konteks, seperti membalik urutan dakwah, berpotensi menimbulkan masalah. Apa yang terjadi, misalnya, ketika strategi debat langsung digunakan pada awal ketika orang belum mengenal ajaran Islam? Alih-alih mendekat, kesan yang muncul pun bisa tidak seperti harapan, apalagi jika debat terjebak dalam emosi yang tidak terkendali.

Karena itu, kesan pertama sangat penting. Sahabat kita yang nonmuslim tidak membaca Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Mereka membaca perilaku kita. Tentu akan sulit meyakinkan mereka bahwa ajaran Islam penuh kedamaian jika kita berperilaku sebaliknya.

Elaborasi ringkas dari poin-poin pada sambutan pengantar sebuah buku yang ditulis pada 24 Februari 2022.

26.Hikmah Ibnu Batutah

Universitas Islam Indonesia (UII) merasa bersyukur dan terhormat, karena sudah dua kali, pada 2021 dan 2022, dipercaya menggelar forum *debriefing* kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Pembicara adalah para duta besar yang sudah menyelesaikan misi masing-masing. Acara itu dikawal oleh Program Studi Hubungan Internasional UII.

Kali ini, tiga duta besar hadir sebagai pembicara. Mereka adalah Duta Besar Rina P. Soemarno (untuk Republik Rakyat Bangladesh 2017-2021), Duta Besar Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (untuk Republik Tunisia 2017-2022), dan Duta Besar I Gusti Ngurah Ardiyasa (untuk Sri Lanka dan Republik Maladewa 2017-2021). Tajuk yang diangkat adalah "diplomasi ekonomi pada pasar nontradisional".

Pengalaman Tangan Pertama

Saya sangat percaya forum *debriefing* ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi sivitas akademika di UII, tetapi juga untuk semua pihak yang peduli terhadap betapa penting membangun kerja sama global antarnegara melalui jalur diplomasi. Diplomasi, dalam segala bentuk, adalah satu-satunya pilihan untuk mengeratkan hubungan

antarnegara dengan tetap menghargai kedaulatan masing-masing.

Pengalaman tangan pertama, dari para duta besar yang mulia, membuat kita makin memahami konteks global yang selalu berubah. Betul, globalisasi telah memudarkan batas antarnegara, tetapi itu tidak menghilangkan keunikan masing-masing.

Karena itu, meningkatkan pemahaman akan keunikan setiap negara, dalam beragam aspek, menjadi sangat penting untuk menjaga semangat saling menghormati dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Catatan "akhir perjalanan" para duta besar ini, karena itu sangat berharga. Banyak pelajaran dapat kita ambil dari mereka.

Perjalanan Ibnu Batutah

Ketika diminta memberi sambutan, ingatan saya tertuju kepada kisah *debriefing* yang terjadi pada 1354 (668 tahun lalu) ketika Ibnu Batutah kembali dari penjelajahannya pada usia 50 tahun. Ibnu Batutah, sendirian, melakukan perjalanan lintas negara ketika baru berusia 21 tahun. Selama 31 tahun, Ibnu Batutah telah menempuh lebih dari 75.000 mil.

Tentu tidak selama waktu itu selalu dalam perjalanan, tetapi diselingi dengan menetap di sebuah wilayah selama beberapa waktu. Rekor jarak perjalanan itu tidak terpecahkan sampai ditemukan mesin uap pada abad ke-18.

Sekembali dari penjelajahan itulah, Ibnu Batutah atas titah Sultan Abu Inan di Fez, Maroko, membuat catatan

debriefing. Dia tidak membuat jurnal selama perjalanan. Berdasar ingatan selama perjalanan, Ibnu Batutah mendiktekan kepada Ibnu Juzayy, sekretaris pribadi sang sultan.

Akhirnya, kisah perjalanan tersebut menjadi buku berjudul cukup panjang, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Hadiah bagi Para Pemerhati Negeri-Negeri Asing dan Pengalaman-Pengalaman Ajaib*. Buku itu sering secara singkat disebut *Ar-Rihlah* (*Perjalanan*, *The Travels*). Kisah Ibnu Batutah itu mengungkap beragam deskripsi sudut dunia tanpa kita harus menjelajahi secara fisik.

Penjelajahan Ibnu Batutah menggunakan perjalanan darat dan laut. Termasuk perjalanan dari Aljazair ke Tunisia, perjalanan ke Ceylon (Sri Lanka), Chittagong di Benggala Timur (Bangladesh), dan ke Maladewa. Tentu itu hanya sebagian kecil dari daftar panjang wilayah atau negara yang Ibnu Batutah kunjungi.

Sudah merupakan takdir Allah jika para duta besar, pada acara forum *debriefing*, memaparkan kisah dari paling tidak empat negara yang juga dikunjungi Ibnu Batutah, yang terekam dalam *Ar-Rihlah*. *Ar-Rihlah* berisi catatan perjalanan internasional dan juga pelaporan budaya. Catatan perjalanan itu dianggap yang paling detail pada masanya. Ibnu Khaldun dalam *Mukaddimah* juga mengomentari laporan perjalanan Ibnu Batutah ke India yang sangat detail.

Serupa dengan *Ar-Rihlah,* saya percaya banyak informasi penting dan tilikan baru yang mengemuka dalam forum *debriefing* ini. Forum seperti ini akan menjadikan

pengalaman "personal" menjadi memori kolektif, untuk basis gerak ke depan yang kuat karena berbasis data yang valid.

Merekam pengalaman dalam beragam media yang bisa secara leluasa diakses khalayak adalah tradisi baik yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan. Saat ini, pilihan sudah beragam, tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk forum terbuka dan bahkan rekaman audio dan video. Itu juga merupakan ikhtiar memperluas akses dan memperpanjang umur manfaat.

Elaborasi ringan dari sambutan pada Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada 22 Maret 2022 yang diselenggarakan secara daring oleh Program Studi Hubungan Internasional bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

27. Kemitraan Pemimpin dan Pengikut

Saya yakin semua sepakat kepemimpinan (*leadership*) diperlukan untuk kebaikan semua komunitas, termasuk organisasi. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan, "Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan." (HR Abu Daud).

Namun ada sisi lain, yang sering terlupa dalam konteks ini, yaitu kepengikutan (*followership*). Pemimpin tanpa pengikut yang loyal dan penuh semangat akan menghadirkan cerita yang berbeda.

Tak ada organisasi yang sanggup berkembang tanpa kepengikutan yang baik. Jalinan kemitraan mutlak diperlukan. Pemimpin dan pengikut pada dasarnya adalah soal pembagian peran yang saling melengkapi. Menjadi pemimpin di banyak konteks organisasi, terutama organisasi nirlaba, juga soal bergantian dalam melayani.

Kemitraan yang baik antara pemimpin dan pengikut akan meningkatkan kinerja keduanya. Dampaknya adalah pada kinerja organisasi.

Belajar dari Ikan

Kita bisa belajar dari banyak contoh dalam melihat hubungan ini. Karena manusia adalah makhluk yang rumit, kita bisa mulai dari contoh sederhana. Salah satunya dari ikan.

Percobaan yang dilakukan ilmuwan Cambridge University, Harcourt dan kawan-kawan (2009), menarik disimak. Mereka ingin menguji bagaimana dampak umpan balik sosial ketika pemimpin dan pengikut berinteraksi dengan baik.

Mereka menggunakan ikan *stickleback* (ikan punggung berduri). Ikan itu hanya berukuran sekitar 5 sentimeter dan menjadi mangsa ikan lain. Mereka biasanya cenderung bersembunyi di semak di dalam air, dan hanya menampakkan diri ketika mengambil makanan.

Dengan pelatihan yang dilakukan di dalam akuarium, mereka mengelompokkan temperamen ikan menjadi dua: "pemberani" dan "pemalu". Ikan pemberani cenderung meninggalkan tempat persembunyian untuk mencari makan, sedangkan ikan pemalu punya tendensi kembali ke persembunyian. Dalam konteks ini, ikan pemberani ibarat pemimpin dan ikan pemalu bak pengikut.

Terdapat 40, alias 20 pasang, ikan yang terlibat. Separuh diletakkan di dalam lingkungan "aman", dengan air yang dalam dan tanaman tempat bersembunyi, sementara sisanya dalam kondisi "berisiko" karena di dalam air cukup dangkal dan tanpa persembunyian. Mereka diberi makan cacing setiap 30 menit.

Kedua kelompok ikan itu semula dipisah dengan sekat tidak transparan. Mereka tidak berinteraksi. Aktivitas ikan direkam dengan video. Frekuensi ikan keluar dari tempat persembunyian untuk muncul ke permukaan dihitung.

Dalam kondisi terpisah, ikan pemberani rata-rata dalam satu jam memiliki 41,3% waktu berada di perairan terbuka, alias tidak sembunyi. Sementara itu, kelompok ikan pemalu hanya punya 14,3% waktu keluar dari persembunyian. Ikan pemberani melakukan 48,1 perjalanan untuk mencari makan dalam satu jam, sedangkan ikan pemalu hanya 17,3. Data itu didapat ketika kedua kelompok ikan dalam kondisi terpisah sekat tanpa interaksi.

Nah, apa yang terjadi ketika sekat dibuka dan mereka bisa berinteraksi? Ikan pemberani dan pemalu berada di ruang terbuka lebih lama, yakni 50,8% dan 33,0% dari waktu mereka. Mereka pun melakukan perjalanan pengambilan makanan lebih sering. Ikan pemberani melakukan 64,3 kali perjalanan, sedangkan ikan pemalu 43,6 kali. Mereka pun melakukan sinkronisasi waktu keluar dari persembunyian alias saling melindungi.

Ikan pemberani memimpin gerakan keluar dari persembunyian untuk mencari makan, diikuti oleh ikan pemalu 20,2 kali. Menarik, ikan pemalu pun memimpin, meski dalam skala lebih sedikit, 10,0 kali.

Beberapa Ibrah

Ada beberapa *ibrah* (pelajaran) yang bisa kita ambil dari cerita tersebut berkait dengan kepemimpinan dan kepengikutan.

Pertama, hal itu menegaskan bahwa tak satu pun makhluk Allah di jagat ini yang tercipta sia-sia tanpa makna. Hanya kadang kita kurang sensitif dan tidak mempunyai kapasitas untuk memahami secara lebih baik. Membaca beragam hasil penelitian yang relevan, misalnya, dapat meningkatkan sensitivitas.

Kedua, terdapat fenomena kepemimpinan dan kepengikutan di banyak konteks, termasuk di kalangan hewan. Dalam koloni semut, misalnya, kita tahu ada semut ratu yang menjadi pemimpin. Ada pembagian tugas dan cara komunikasi di antara mereka dengan menggunakan feromon, bau yang mereka keluarkan (Kocher & Grozinger, 2011). Di kalangan lebah, sebagai contoh lain, juga ada pembagian kerja antara lebah ratu dan lebah pekerja. Komunikasi antarlebah dilakukan dengan tarian lebah untuk memberi kode berkait dengan sumber makanan, termasuk jarak, arah, dan kelimpahan nektar (Dornhaus & Chitra, 2004). Manusia dapat mengambil beragam pelajaran dari kerja sama berbagai jenis hewan.

Ketiga, kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan pengikut ternyata meningkatkan kinerja keduanya. Kesadaran mendapatkan manfaat bersama itu sangat penting untuk menjadi motivasi kolektif. Kepemimpinan yang baik tanpa dibarengi kepengikutan tidak akan memberikan dampak optimal. Karena itu, kepemimpinan tidak mewakili keseluruhan cerita dalam dinamika sebuah organisasi (Hurwitz & Hurwitz, 2015).

Sambutan pembukaan Pesantren Ramadan 1443
Unit Rektorat Universitas Islam Indonesia, 25 April 2022.

Referensi

Catatan:
Beberapa referensi langsung dituliskan di dalam teks.

Beaton, E. E. (2021). "Institutional Leadership: Maintaining Mission Integrity in the Era of Managerialism". *Nonprofit Management and Leadership*, 32(1), 55-77.

Bradshaw, S., Bailey, H. & Howard, P. N. (2021). "Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation". *Working paper 2021.1*. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.

Chaney, E. (2016). "Religion and the Rise and Fall of Islamic Science|". *Working paper,* Department of Economics, Harvard University, Cambridge, MA.

Clark, B. R. (1996). "Substantive Growth and Innovative Organization: New Categories for Higher Education Research". *Higher Education*, *32*(4), 417-430.

Ariely, D. (2008). *Predictably Irrational*. New York: HarperCollins.

Davies, W. (2018). *Nervous States: Democracy and the Decline of Reason*. New York: WW Norton & Company.

Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Diamond, J. (2019). *Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis*. New York: Little, Brown and Co.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields". *American Sociological Review*, 48, 147-160.

Dornhaus, A., & Chittka, L. (2004). "Why do Honey Bees Dance?". *Behavioral Ecology and Sociobiology*, *55*(4), 395-401.

Duerr, F., & Herkommer, A. (2019). "Why does Interdisciplinary Research Matter?" *Advanced Optical Technologies*, *8*(2), 103-104.

Fleming, P. (2021). *Dark Academia: How Universities Die*. London: Pluto Press.

Flynn, D. J., Nyhan, B., & Reifler, J. (2017). "The Nature and Origins of Misperceptions: Understanding False and Unsupported Beliefs about Politics". *Political Psychology*, *38*, 127-150.

Fung, A. (2011). "The Constructive Responsibility of Intellectuals". *Boston Review*. Tersedia daring: https://www.bostonreview.net/articles/ archon-fung-noam-chomsky-responsibility-of-intellectuals/

Giroux, H. A. (2017). "Neoliberalism's War against Higher Education and the Role of Public Intellectuals". *The Future of University Education* (pp. 185-206). Cham: Palgrave Macmillan.

Greenhill, K. M., & Oppenheim, B. (2017). "Rumor has it: The Adoption of Unverified Information in Conflict Zones". *International Studies Quarterly*, 61(3), 660-676.

Harcourt, J. L., Ang, T. Z., Sweetman, G., Johnstone, R. A., & Manica, A. (2009). "Social Feedback and the Emergence of Leaders and Followers". *Current Biology*, *19*(3), 248-252.

Heawood, J. (2018). "Pseudo-Public Political Speech: Democratic Implications of the Cambridge Analytica Scandal". *Information Polity*, 23(4), 429-434.

Huntington, S. P. (1997) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Touchestone.

Hurwitz, M., & Hurwitz, S. (2015). *Leadership is Half the Story: A Fresh Look at Followership, Leadership, and Collaboration*. Toronto: University of Toronto Press.

Kietzmann, J. H., Silvestre, B. S., McCarthy, I. P., & Pitt, L. F. (2012). "Unpacking the Social Media Phenomenon: Towards A Research Agenda". *Journal of Public Affairs*, *12*(2), 109-119.

Kocher, S. D., & Grozinger, C. M. (2011). "Cooperation, Conflict, and the Evolution of Queen Pheromones". *Journal of Chemical Ecology*, *37*(11), 1263-1275.

Lašáková, A., Bajzíková, Ľ., & Dedze, I. (2017). "Barriers and Drivers of Innovation in Higher Education: Case Study-Based Evidence Across Ten European Universities". *International Journal of Educational Development*, *55*, 69-79.

Ledford, H. (2015). "How to Solve the World's Biggest Problems". *Nature*, *525*, 308-311.

Leithwood, K. A., & Hallinger, P. (ed.). (2012). *Second International Handbook of Educational Leadership and Administration* (Vol. 8). Springer Science & Business Media.

Lynch, K. (2015). "Control by Numbers: New Managerialism and Ranking in Higher Education". *Critical Studies in Education*, *56*(2), 190-207.

Nichols, T. (2017). *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*. Oxford: Oxford University Press.

Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). "When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions". *Political Behavior*, 32(2), 303–330.

Rodrik, D. (2017). "The Fatal Flaw of Neoliberalism: It's Bad Economics". *The Guardian*. 14 November. Tersedia daring di https://www.theguardian.com/ news/2017/nov/14/the-fatal-flaw-of-neoliberalism-its-bad-economics

Rosser, A. (2022). "Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance". *Journal of Contemporary Asia*, 52(1), 1-26.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. London: Routledge.

Said, E. W. (2001). "On Defiance and Taking Positions". *Reflections on Exile and Other Essays* (500-506). Cambridge: Harvard University Press.

Sardar, Z. (2006). "What do We Mean by Islamic Futures?" M Abu-Rabi'. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought* (562-586). Malden, MA: Blackwell Publishing.

Sardar, Z., & Sweeney, J. A. (2016). "The Three Tomorrows of Postnormal Times". *Futures*, *75*, 1-13.

Sastramidjaja, Y., & Wijayanto (2022). *Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia's Cybersphere*. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Sloman, S., & Fernbach, P. (2017). *The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone*. Penguin.

Swire, B., Berinsky, A. J., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2017). "Processing Political Misinformation: Comprehending the Trump Phenomenon". *Royal Society Open Science*, 4(3), 160802.

van Noorden, R. (2015). "Interdisciplinary Research by the Numbers". *Nature*, *525*, 306-307.

von Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. G. Braziller.

Wollast, R., Boudrenghien, G., Van der Linden, N., Galand, B., Roland, N., Devos, C., De Clercq, M., Klein, O., Azzi, A. and Frenay, M. (2018). "Who are the Doctoral Students Who Drop Out? Factors Associated with the Rate of Doctoral Degree Completion in Universities". *International Journal of Higher Education*, *7*(4), 143-156.

Wong, J. C (2019). "Facebook to be Fined $5bn for Cambridge Analytica Privacy Violations" – reports. *The Guardian*, 12 Juli.

Tersedia daring: https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/12/facebook-fine-ftc-privacy-violations
Young, S. N., VanWye, W. R., Schafer, M. A., Robertson, T. A., & Poore, A. V. (2019). Factors affecting PhD student success. *International Journal of Exercise Science*, *12*(1), 34.
Zakaria, F. (2020). *Ten Lessons for A Post-Pandemic World*. UK: Penguin.
Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A* Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books.

Fathul Wahid

Data pribadi

Tempat, tanggal lahir: Jepara, 26 Januari 1974
Jabatan akademik: Profesor (Sistem Informasi)
Lembaga: Jurusan Informatika
Universitas Islam Indonesia
NIDN: 0526017401
Scopus ID: 8840512500
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3124-6866
Google Scholar profile: goo.gl/cDKAdX
Blog: uii.ac.id/pojok-rektor
fathulwahid.wordpress.com
menjadidosen.wordpress.com
publikasiinternasional.wordpress.com

Keluarga

Istri: Prof. Nurul Indarti, S.E., Sivilokonom, Cand.Merc., Ph.D.
Anak: Aqila Salma Kamila, S.P.W.K.
Ahsana Zaima Mahira

Riwayat jabatan akademik

1998 Bergabung dengan Universitas Islam Indonesia
2000 Asisten Ahli
2007 Lektor
2010 Lektor Kepala
2019 Profesor

Riwayat pendidikan

1. Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (Ph.D., 2010-2013)
2. Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (M.Sc., 2001-2003)
3. Department of Arts and Sciences (Norwegian Language and Civilization for Foreign Students), Telemark University College, Norwegia (2000-2001)
4. Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (S.T., 1993-1997)
5. Jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1992-1993)
6. SMA Muhammadiyah I, Yogyakarta (1989-1992)
7. Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin, Jagalan, Kudus (1986-1989)

8. Madrasah Diniyyah Mu'awanatul Muslimin, Kenepan, Kudus (1986-1989)
9. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus (1986-1989)
10. Madrasah Diniyyah Al-Ishlah, Teluk Wetan, Welahan, Jepara (1982-1986)
11. SD Negeri Teluk Wetan III, Welahan, Jepara (1981-1986)

Riwayat amanah

1. Profesor (Sistem Informasi), Universitas Islam Indonesia (Desember 2019- sekarang)
2. Wakil Ketua Bidang Dosen dan Tendik, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat (2021-2025)
3. Ketua, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (2019-2023)
4. Sekretaris Umum, Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) (2019-2023)
5. Rektor, Universitas Islam Indonesia (Juni 2018- sekarang)
6. Kepala Badan Sistem Informasi, Universitas Islam Indonesia (Mei 2016- Mei 2018)
7. Kepala Badan Pengembangan Akademik, Universitas Islam Indonesia (2014-April 2016)
8. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (2006-2010)
9. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (2005-2006)
10. Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (2004-2005)
11. Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (1999-2000)
12. Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (1998-1999)

Publikasi ilmiah (terpilih)

Artikel di jurnal/prosiding

1. Alfandya, A., & Wahid, F. (2021). Memahami perjalanan"Kampung Cyber" melalui lensa Actor Network Theory. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, *8*(6), 1149-1158.
2. Nuswantoro, S. A., Wahid, F., & Putro, H. P. (2020). Risiko pengembangan perangkat lunak di indonesia: Temuan Studi Delphi. *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 10(1), 43-54.

3. Wahid, F. (2020). Mendesain Transformasi Pendidikan yang Kokoh dan Lentur. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, Universitas Majalengka, September.
4. Alfandya, A., & Wahid, F. (2020). Peran modal sosial dalam keberhasilan inisiatif teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 5(1), 56-66.
5. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2019). Surviving the Disconnections: The Use of Information Systems in Indonesian Public Health Facilities. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 482(1).
6. Dini, A. A., Sæbo, Ø., & Wahid, F. (2018). Affordances and effects of introducing social media within eParticipation—Findings from government-initiated Indonesian project. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. 84(4).
7. El-Gazzar, R. F., Wahid, F, & Stendal, K. (2018). Unpacking Knowledge on Cloud Computing: An Umbrella Review. *Proceedings of the 2018 Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2018)*. New Orleans, 16-18 Agustus.
8. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2018). Surviving the disconnections: The use of information systems. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2018*, Manila, 8 November.
9. Wahid, F., Dirgahayu, R. T., Hamzah, A., & Setiaji, H. (2017). When more is less: The case of disconnected information systems in Indonesian public health facilities. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2017*, Yogyakarta, 8 November.
10. Wahid, F. (2017). Social Media in The Public Sector: Current Practices and Ways Forward. Dalam N. I. Jaafar & A. Sulaiman (Eds.). *The Influences of Social Networks in Modern Society*. Malaysia: University of Malaya.
11. El-Gazzar, R. F., Henriksen, H. Z., & Wahid, F. (2017). IT Innovations and Entrepreneurship in Emerging Economies - Is Cloud Computing a Magic Ingredient for Egyptian Entrepreneurs? Proceedings of The 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, 5-10 Juni.
12. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2017). Tensions in Information System Artefacts: Explaining Land Information Systems' Sub-Optimal Impact in Indonesia. *Proceedings of the 14th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*. Berlin Heidelberg: Springer.
13. Dini, A. A., & Wahid, F. (2017). Four Strategies of Social Media Use

among Indonesian Politicians. *Proceedings of the 14th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*. Berlin Heidelberg: Springer.

14. Hamzah, A., & Wahid, F. (2016). Participatory Design in the Development of Healthcare Systems: A Literature Review. *Proceedings of the 2nd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP 2016)*, Singapore, 26-29 November.
15. Wahid, F. (2016). Power Exercise in the Institutionalization of an eProcurement System in Indonesian Local Government. *Proceedings of the International Conference on Information Technology and Digital Applications* (*ICITDA*) 2016, Yogyakarta, 14-16 November.
16. Dini, A. A., Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2016). Affordances and Constraints of Social Media Use in eParticipation: Perspectives from Indonesian Politicians. *Proceedings of The 20th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2016),* Chiayi, Taiwan, 27 Juni-1 Juli.
17. Nur Kholis, N., Maharika, I.F., & Wahid, F. (2015). Recasting the Disciplines under the Framework of Islam: Lessons from the Textbook Writing Initiative at Universitas Islam Indonesia. *Proceedings of the International Conference in the Integration of Contemporary and Islamic Knowledge in Islamic Universities*, Gontor, Indonesia, 12-14 Desember.
18. Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2015). Affordances and Effects of Promoting eParticipation Through Social Media. Dalam E. Tambouris, H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, K. Tarabanis (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer.
19. El-Gazzar, R. F., & Wahid, F. (2015). Strategies for Cloud Computing Adoption: Insights from the Norwegian Public Sector. *Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2015 (EMCIS2015)*, Athens, Greece, 1-2 Juni.
20. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2015). Does a Land Information System Resolve Land Conflicts? A Tale from Rural Eastern Indonesia. *Proceedings of the ICTD 2015 Conference*, Singapore, 15-18 Mei.
21. Hamzah, A., & Wahid, F. (2015). Reexamining usability dimensions: The case of social media. *Proceedings of the 3rd International Conference of Information and Communication Technology*, Bali, 27-29 Mei.
22. Wahid, F. (2015). Power Play in the Institutionalization of an eProcurement System: A Tale from Indonesian Local Government. *Proceedings of the 3rd International Conference of Information and Communication Technology*, Bali, 27-29 Mei.

23. Wahid, F., Sæbø, Ø., & Furuholt, B. (2015). The Use of Information Systems in Indonesia's Land Management. *Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*, Negombo, Sri Lanka, 20-23 Mei.
24. Furuholt, B., Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2015). Land Information Systems: A Neglected Area in the ICT4D Research?. *Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2015* (hal. 2158-2167), Kauai, Hawaii, 5-8 Januari.
25. Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2014). Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government. Dalam Linawati, M. S. Mahendra, E. J. Neuhold, A. M. Tjoa, & I. You, I. (Eds.), *Information & Communication Technology*, Berlin Heidelberg: Springer, 328-337.
26. Setyono, P., Wahid, F., & Meidawati, N. (2014). Unintended Benefits of Adopting an ERP System in an Indonesian University. Dalam N. Panchaud & E. Marclay (Eds.), *SAP for Universities*. Lausanne, Switzerland: EPFL Press.
27. Wahid, F., & Sein, M. K. (2014). Steering Institutionalization through Institutional Work: The Case of an eProcurement System in Indonesian Local Government. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2014*, Hawaii, 6-9 Januari.
28. Wahid, F. (2013). The Antecedents and Impacts of a Green eProcurement Infrastructure: Evidence from the Indonesian Public Sector. *International Journal of Internet Protocol Technology*, *7*(4), 210-218.
29. Wahid, F., & Indarti, N. (2013). Facebook, Online Social Network, and the Rise of Nascent Entrepreneurs. Dalam Gaol, F. L., Kadry, K., Taylor, M., & Li, P. S. (Eds.). *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*. Leiden, The Netherlands: CRC Press.
30. Wahid, F., Ramdhani, N., & Wiradhany, W. (2013). More Gaining and Less Gaming? The Internet Use in Indonesia After One Decade. Dalam Gaol, F. L., Kadry, K., Taylor, M., & Li, P. S. (Eds.). *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*. Leiden, The Netherlands: CRC Press.
31. El-Gazzar, R., & Wahid, F. (2013). An Analytical Framework to Understand the Adoption of Cloud Computing: An Institutional Theory Perspective.*Proceedings of the International Conference on Cloud Security Management (ICCSM) 2013*, Seattle, USA, 17-18 Oktober.
32. Wahid, F., & Prastyo, D. (2013). Politicians' Trust in the Information Technology Use in General Election: Evidence from Indonesia. *Procedia Technology*, *11*, 374–379.
33. Merschbrock, C., & Wahid, F. (2013). Actors' Freedom of Enactment in a Loosely Coupled System: The Case of BIM Use in Construction

Projects. *Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS) 2013*, Utrecht, The Netherlands, 6-8 Juni.

34. Wahid, F. (2013). A Triple-Helix Model of Sustainable Government Information Infrastructure: Case Study of the eProcurement System in the Indonesian Public Sector. Dalam H. Linger, J. Fisher, A. Barnden, C. Barry, M. Lang, C. Schneider (Eds.) *Building Sustainable Information Systems*, Berlin Heidelberg: Springer.
35. Wahid, F. (2013). Translating the Idea of the eGovernment One-Stop Shop in Indonesia. Dalam Khabib, M., Neuhold, E. J., Tjoa, A M., Weippl, E., and You, I (Eds). *Information & Communication Technology*. Berlin Heidelberg: Springer, 1-10.
36. Wahid, F., & Sein, M. K. (2013). Institutional Entrepreneurs: The Driving Force in Institutionalization of Public Systems in Developing Countries. *Transforming Government: People, Process and Policy*, *7*(1), 76-92.
37. Wahid, F. (2013). Themes of Research on eGovernment in Developing Countries: Current Map and Future Roadmap. *Proceedings of the 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2013*, Hawaii, 7-10 Januari.
38. Wahid, F., & Furuholt, B. (2012). Understanding the Use of Mobile Phones in the Agricultural Sector in Rural Indonesia: Using the Capability Approach as Lens. *International Journal of Information and Communication Technology*, *4*(2/3/4), 165-178.
39. Indarti, N., & Wahid, F. (2012). University-Industry Joint-Research: How does the Indonesian Industry Perceive It?. *The Triple Helix 10th International Conference 2012*, Bandung, Indonesia, 8-10 Agustus.
40. Wahid, F. (2012). The Green eProcurement Infrastructure in the Indonesian Public Sector: Its Antecedents and Impact on the Triple Bottom Line. *Proceedings of the 2012 International Conference in Green and Ubiquitous Technology*, Bandung, Indonesia, 7-8 Juli.
41. Wahid, F. (2012). Institutionalization of Public Systems in Developing Countries: A Case Study of eProcurement in Indonesian Local Government. *Proceedings of the Transforming Government Workshop 2012*, Brunel University, West London, UK, 8-9 Mei.
42. Wahid, F. (2012). The Current State of Research on eGovernment in Developing Countries: A Literature Review. Dalam H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, C. E. Moe, L. S. Flak (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer, 1-12.
43. Wahid, F., (2011). Is There a Bidirectional Relationship between e-Government and Anti-Corruption Practices?: Analysis of Cross-Country Data. *Proceedings of the International Conference on Informatics for Development 2011*, Yogyakarta, Indonesia, 26 November.

44. Wahid, F., Sein, M. K., & Furuholt, B. (2011). Unlikely Actors: Religious Organizations as Intermediaries in Indonesia. *Proceedings of the 11th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*, Kathmandu, Nepal, 22-25 Mei.
45. Wahid, F. (2011). Explaining History of e-Government Implementation in Developing Countries: An Analytical Framework. Dalam M. Janssen et al. (Eds.). *Electronic Government*. Berlin Heidelberg: Springer, 38–49.
46. Wahid, F. (2011). Explaining Failure of E-Government Implementation in Developing Countries: A Phenomenological Perspective. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011*, Yogyakarta, 17-18 Juni.
47. Wahid, F., & Setyono, P. (2010). Dealing with the Misfits in an ERP Implementation: Experiences from a University Context in Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010*, Yogyakarta, 19 Juni.
48. Wahid, F. (2010). Examining Adoption of e-Procurement in Public Sector using the Perceived Characteristics of Innovating: Indonesian Perspective. Dalam A. B. Sideridis & Ch. Z. Patrikakis (Eds.). *e-Democracy*, Berlin Heidelberg: Springer, 64–75**.**
49. Kristiansen, S., Wahid, F., & Furuholt, B. (2008). Gaming or gaining? Internet café use in Indonesia and Tanzania. *The International Information & Library Review*, *40*(2), 129–139.
50. Furuholt, B., & Wahid, F. (2008). E-government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen. *Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2008*, Hawaii, 7- 10 Januari.
51. Wahid, F. (2007). Using the Technology Adoption Model to Analyze Internet Adoption and Use among Men and Women in Indonesia. *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, *32*, 1-8.
52. Kristiansen, S., Wahid, F., & Furuholt, B. (2006). Investing in Knowledge? Information Asymmetry and Indonesian Schooling. *International Information & Library Review*, *38*(2), 192–204.
53. Wahid, F., Furuholt, B., & Kristiansen, S. (2006). Internet for Development? Patterns of Use Among Internet Cafe Customers in Indonesia. *Information Development*, *22*(4), 278-291.
54. Kristiansen,S.,Kimeme,J.,Mbwambo,A.,&Wahid,F.(2005).Informatio n Flows and Adaptation in Tanzanian Cottage Industries. *Entrepreneurship and Regional Development*, *17*, 365-388.
55. Furuholt, B., Kristiansen, S., & Wahid, F. (2005). The Spread of Information in a Developing Society: A Study of Internet Cafe Users in Indonesia. *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, *22*, 1-16.

56. Kristiansen, S., Furuholt, B., & Wahid, F. (2003). Internet Cafe Entrepreneurs: Pioneers in Information Dissemination in Indonesia. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, *4*(4), 251-263.

Buku

1. Wahid, F. (akan terbit). *Kecil-Kecil Cabai Rawit: Cerita Ringan dari Kelas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
2. Wahid, F. (Ed.) (akan terbit). *Membangun Budaya Digital: Pelajaran dari Lapangan*. Yogyakarta: UII Press.
3. Wahid, F. (2022). *Merawat Misi Universitas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
4. Wahid, F. (2021). *Manajemen Universitas di Tengah Turbulensi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
5. Wahid, F. (2020). *Sayap-Sayap Kemajuan Universitas*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
6. Wahid, F. (2020). *Mendesain Universitas Masa Depan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
7. Wahid, F. (2020). *Melakukan Publikasi Internasional*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
8. Wahid, F. (2019). *Tentang Menjadi Dosen*. Jakarta: nulisbuku.com.
9. Wahid, F., & Dirgahayu, T. (Editor) (2012). *Pembelajaran Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi: Perspektif dan Pengalaman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
10. Wahid, F. (2010). *Servant Leadership: Refleksi Kepala Pelayan Kampus*. Yogyakarta: Navila Idea.
11. Kusumadewi, S., Fauzijah, A., Khoiruddin, A. A., Wahid, F., Setiawan, M. A., Rahayu, N. W., Hidayat, T., & Prayudi, Y. (2009). *Informatika Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
12. Wahid, F. (2007). *Teknologi Informasi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Ardana Media.
13. Wahid, F. (2004). *E-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*. Yogyakarta: Gava Media.
14. Wahid, F. (2004). *Dasar-dasar Algoritma dan Pemrograman*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
15. Wahid, F. (2003) *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

ISLAM

UNIVERSITAS

INDONESIA

KESADARAN KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI

Paling tidak ada dua kesadaran yang saya soal dalam buku ini. Kedua kesadaran itulah yang menjadi subbingkai untuk mengelompokkan tulisan dalam buku ini.

Pertama, kesadaran sebagai anak bangsa. Tulisan yang berkait dengan isu-isu publik dan kebangsaan, saya masukkan dalam kelompok ini. Kelompok ini saya dahulukan untuk menegaskan: kepentingan bangsa harus mendapat prioritas terbaik.

Kedua, kesadaran sebagai warga kampus. Tulisan yang mengangkat isu keilmuan, manajemen perguruan tinggi, dan intelektualisme, saya bingkai sebagai bagian kesadaran peran sebagai warga kampus. Termasuk dalam kelompok ini adalah tulisan yang mengangkat isu keislaman dan keagamaan secara luas.

Saya berharap, berbagai ide yang terekam dalam tulisan-tulisan ini akan mengusik pemahaman jamak yang selama ini kita yakini, memantik kerutan dahi untuk memikirkan ulang beragam hal, dan juga mengajak mendiskusikan lebih lanjut dengan asyik.

ISBN 978-1-78280-808-4